

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan laporan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. Selain itu laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Pada laporan ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 dalam Sektor Perhubungan.

Dengan segala keterbatasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun pada kenyataannya tidak terlepas dari kekurangan, sehubungan dengan kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dan evaluasi dengan pihak terkait. Semoga LAKIP ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Kepala Dinas,



M. FILIP HERNADI, A.P.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751102 1994121 0 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri 1 Eselon II, yaitu Kepala Dinas, 4 Eselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Pelayaran, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kepala Bidang Angkutan Jalan dan terdiri 1 Eselon III pada UPTD Terminal Tipe B. Sedangkan Eselon IV pada Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 11 Jabatan (Kasubbag dan Kasi) dan Eselon IV pada UPTD Terminal Tipe B sejumlah 3 Jabatan (Kasubbag dan Kasi).

Pengembangan urusan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan upaya mewujudkan Visi "Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibukota Negara" dan Misi Kepala Daerah, misi 3 yaitu "Memperkuat sarana dan prasarana perekonomian"

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026. Adapun tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan guna mendukung Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dari output pembangunan sarana dan prasarana transportasi diharapkan dapat tercapai outcome yang berkesinambungan dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan, konektivitas wilayah di pedalaman untuk kemudahan aksesibilitas.

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana Terminal Tipe B
3. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan perlunya dukungan instansi lain (Kementerian Perhubungan, Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Organisasi, Kemenpan RB, Dishub Kab/Kota, BPTD Wil. XV Prov. Kalsel).
4. Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor perhubungan untuk mewujudkan program visi dan misi gubernur;
5. Peningkatan komitmen unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja khususnya dalam hal perencanaan kinerja, maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;

6. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang akan berpengaruh pada rencana strategis, kegiatan dan program Dinas Perhubungan;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja guna meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .iv	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Isu Strategis SKPD.....	4
E. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.....	6
Sumber Data : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
C. Critical Success Factors (CSF)	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	29
1. Sasaran RPJMD	29
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	46
3. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	51
3.1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	54
3.2 Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset	59
4. Kepala Bidang Pelayaran	64
4.1 Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran ...	68
4.2 Kepala Seksi Prasarana Pelayaran.....	73
4.3 Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa.....	75
5. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.....	78
5.1 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas.....	82
5.2 Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan ...	86
5.3 Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan	89
6. Kepala Bidang Angkutan Jalan	93
6.1 Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang.....	96

6.2 Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal.....	99
6.3 Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan	105
7. Kepala UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan.....	109
7.2 Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan .	116
7.3 Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan	119
B. Akuntabilitas Keuangan	126
B.1. Berikut Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Kalsel	126
B.2. Berikut Akuntabilitas Keuangan UPTD Terminal Tipe B.....	133
BAB IV PENUTUP 138	
A. Kesimpulan.....	138
B. Strategi Peningkatan Kinerja	138

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaporan Kinerja bertujuan memberikan Informasi capaian Kinerja yang terukur atas target kinerja yang diperjanjikan.

Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 telah berjalan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dalam setiap periode tahunan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Perangkat daerah baru atas dasar terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Perangkat Daerah Provinsi Kalsel.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 072 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

b. Tugas Pokok

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perhubungan;

3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Lalu Lintas Jalan;
4. Memutuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Pelayaran;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Angkutan Jalan;
6. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis;
7. Membina dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

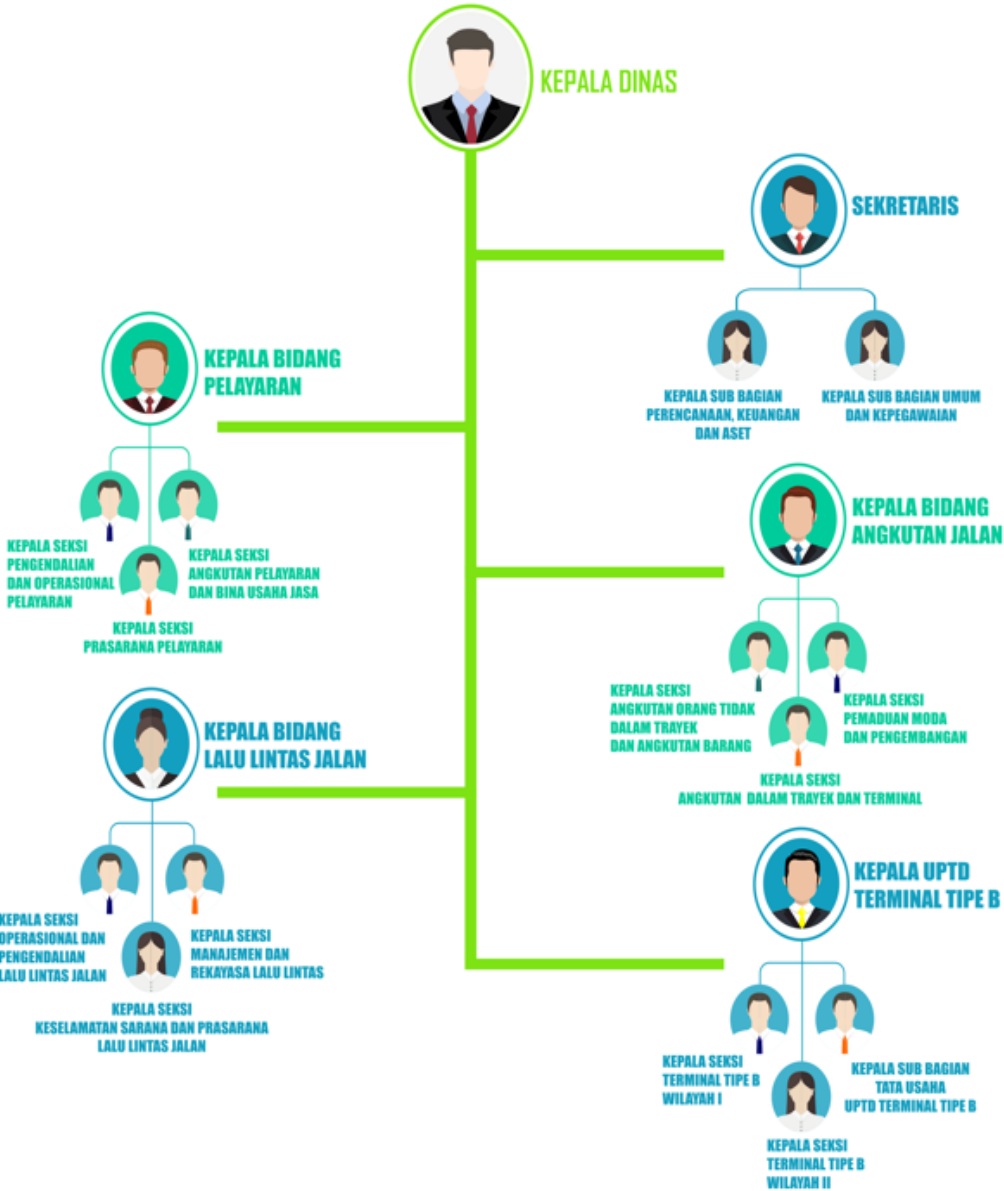
c. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan
2. Pelaksanaan kebijakan lalulintas jalan
3. Pelaksanaan kebijakan pengembangan angkutan jalan, pemandu moda transportasi dan pengelolaan terminal
4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional dan keselamatan angkutan pelayaran
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana teknis
6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 1 (satu) (Kepala Dinas), 4 (empat) Esselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang), 11 (sebelas) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi), Kepala UPTD Terminal Tipe B 1 (satu) dan 3 (tiga) (Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi). Secara rinci struktur organisasi tersebut, sebagaimana dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

D. Isu Strategis SKPD

Isu-isu strategis terkait Perhubungan Provinsi Kalimantan selatan berkaitan dengan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bidang Pelayaran
 - a. Belum optimalnya kelancaran alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan;
 - b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayaran;
 - c. Belum optimalnya sosialisasi/bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan Perairan;
 - d. Belum optimalnya kinerja transportasi Perairan;

2. Bidang Lalu Lintas Jalan
 - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas di jalan.
 - b. Masih perlunya pembinaan terhadap unit pengujian kendaraan bermotor
 - c. Masih perlunya koordinasi dan konsolidasi kepada instansi terkait lainnya.
 - d. Masih adanya ruas jalan yang belum dilakukan manajemen lalu lintas.
 - e. Masih adanya pelanggaran angkutan tambang dan hasil perkebunan yang menggunakan jalan umum.
 - f. Belum maksimalnya pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

3. Bidang Angkutan Jalan
 - a. Masih terbatasnya jangkauan pelayanan angkutan jalan, masih diperlukan angkutan jalan untuk menjangkau wilayah perdesaan dan terpencil terutama daerah yang berpotensi cepat tumbuh sehingga jangkauan pelayanan untuk angkutan jalan juga terbatas.
 - b. Masih perlu dioptimalisasikannya pelayanan angkutan massa multi moda Banjarbakula.
 - c. Belum adanya Studi terkait kebijakan jalur kereta api.
 - d. Belum adanya optimalisasi pengawasan terhadap angkutan barang dan angkutan penumpang.
 - e. Belum optimalnya pengawasan terhadap Terminal Tipe B.

4. UPTD Terminal Tipe B
 - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan berlalu lintas di Jalan Keluar-Masuk terminal,
 - b. Masih adanya pelanggaran angkutan penumpang/barang dan kendaraan pribadi yang tidak membayar tarif retribusi,
 - c. Belum maksimalnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam pelaksanaan

- kegiatan administrasi,
- d. Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal untuk penyandang disabilitas maupun fasilitas layanan lain nya,
 - e. Belum optimalnya pengawasan terhadap Terminal Tipe B,
 - f. Belum optimalnya sosialisasi/bimbingan keselamatan kepada para operator terminal serta masyarakat pengguna jasa angkutan umum,
 - g. Belum optimalnya kinerja transportasi di Terminal.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, Dasar Hukum Pembentukan dan tugas pokok beserta fungsi, struktur organisasi, Isu Strategis SKPD dan sistematika penyajian.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- Bab III Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Perencanaan/program pembangunan tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan disusun mengacu dan berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terinci, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam lingkup visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016-2021 adalah :

”Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibukota Negara.”

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 :

- a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata
- c. Memperkuat sarana dan prasarana dasar dan perekonomian
- d. Tata kelola pemerintah yang lebih focus pada pelayanan public
- e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana

Berdasarkan visi maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah tahun 2021-2026 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan adalah terdapat pada **misi 3** yaitu **“Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian”**

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut :



Selanjutnya tabel berikut memperlihatkan sasaran indikator kinerja 2021 – 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.1. Target dan Sasaran Indikator Kinerja 2021 – 2026

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Konektivitas transportasi darat dan Perairan	Rasio Konektivitas	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67
2	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Ontime Performance Layanan Transportasi	34	58.5	58.5	59.0	60.0	61.5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	77,5	81.3	81.5	81.7	82.0	82.2
3	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100.000 Keberangkatan	2.73	2.65	2.6	1.6	0.75	0

Sumber Data : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra 2021-2026 Dinas Perhubungan, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- a. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan;
- b. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
- c. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efisiennya dan efektifnya mobilitas penduduk;
- d. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
- e. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lalu lintas dan perlengkapan jalan yang efisien dan efektif.
- f. Pengembangan transportasi darat yang aman, tertib, terintegrasi dan terjangkau;

- g. Pengembangan transportasi laut, dengan standar internasional dengan memanfaatkan keunggulan teknologi serta pengembangan wilayah;
- h. Pengembangan transportasi udara, dengan standar internasional dengan memanfaatkan keunggulan teknologi serta pengembangan wilayah;
- i. Pengembangan transportasi berbasis rel, dengan memanfaatkan keunggulan teknologi serta pengembangan wilayah;
- j. Belum optimalnya capaian kinerja dalam Menurunnya angka kecelakaan dan gangguan keamanan dalam pelayanan transportasi;
- k. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
- l. Belum terlalu optimalnya sarana dan prasarana transportasi yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
- m. Perlunya optimalisasi terhadap koordinasi antar sektor

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0.61	Kepala Dinas
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air)	%	58.5	
	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	%	85	
		Jumlah Inovasi pelayanan publik	Buah	2	

		yang dicanangkan			
	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi umum dengan fatality kecelakaan per 100.000 keberangkatan	Rasio	2,6	
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	%	100	Sekretaris
		Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	%	100	
	Peningkatan kualitas SDM OPD	Persentase Pemenuhan Peguruan administrasi kepegawian	%	100	
		Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	%	100	
		Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	%	100	
	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	%	100	
	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran SOPD	%	100	
		Persentase aset yang tercatat	%	100	
3.	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	115	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	14	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bagnunan kantor yang dsediakan	Paket	1	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	12	
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	9	
	Tersedianya barang cetakan dan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang	Bulan	12	

	pengadaan	disediakan			
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bulan	12	
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	
	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD	Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	12	
	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	
	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	
	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	
	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	
	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	
	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	
4	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
	Tersediannya dokumen RKA-	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil	Dokumen	1	

SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			
Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	
Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	
Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	
Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	17	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN	Bulan	12	
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	

	ASN				
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	
	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	
	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	
5.	Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan	Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar	%	25,64	Kepala Bidang Pelayaran
		Persentase moda transportasi air laik berlayar	%	70	
		Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (crosscutting kepolisian daerah)	%	35	
		Persentase kecelakaan angkutan perairan (Fatality accident)	%	0	
		Persentase ketetapan waktu tempuh trayek lintas perairan	%	66	
6.	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan	Unit	9	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Pelayaran
	Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	Laporan	4	

	daerah provinsi				
7.	Tersedianya dokumen terkait pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5	Kepala Seksi angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa
	Tersedianya angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	Jumlah angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan provinsi dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	Unit	20	
8.	Tersedianya data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten / kota dalam daerah provinsi	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi	Lintasan	5	Kepala Seksi Prasarana Pelayaran
9.	Meningkatnya keselamatan,	Persentase angkutan umum yang lolos uji kir/laik	%	100	Kepala Bidang Lalu

	Transportasi	jalan			Lintas Jalan
		Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident)	%	0	
		Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas	%	100	
		Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	%	100	
10.	Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	1	Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
	Terlaksananya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Dokumen	12	
	Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi	Laporan	5	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Laporan	4	
	Terawasinya pelaksanaan rekomendasi andalalin	Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi	Laporan	6	
11.	Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang tersedia	Unit	926	Kepala Seksi Keselamatan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	372	
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	13	

12.	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Laporan	12	Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Lalu Lintas
13.	Meningkatkan kualitas dan ketertiban angkutan umum di prov. Kalsel	Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP	%	15	Kepala Bidang Angkutan
		Persentase terangkutnya barang	%	100	
	Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan	Persentase ketepatan waktu tempuh angkutan umum	%	80	
14.	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / angkutan barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Unit	11	Kepala Seksi Pemanduan Moda Dan Pengembangan
	Terkendalinya dan terawasinya ketersediaan angkutan umum untuk orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Laporan	4	
	Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi	Dokumen	1	
15.	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi	Dokumen	1	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Terminal
	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	2	

	Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi			
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	4	
	Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	4	
16.	Tersusunya kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi	Dokumen	2	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi	Laporan	4	

17.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Transportasi Di Terminal Tipe B	Persentase peningkatan kepuasan pengguna terminal tipe b	%	77.5	Kepala UPTD Terminal Tipe B
	Pelayanan jasa administrasi tata usaha kantor UPTD Terminal Tipe B	Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan UPTD terminal tipe b	%	100	
		Persentase pengelola administrasi umum dan administrasi kepegawian UPTD Terminal Tipe B	%	100	
		Persentase pemenuhan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan UPTD terminal tipe b	%	100	
18.	Berkembangnya sarana dan prasarana terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	%	100	Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	%	100	
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Unit	26	
19.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II
	Tersusunnya rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B	Jumlah rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B	Dokumen	1	
20.	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN terminal tipe b	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	2	Kasubag TU UPTD Terminal Tipe B
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir	Laporan	1	

	penyusunan laporan keuangan akhir tahun terminal tipe b	tahun terminal tipe b			
	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester terminal tipe b	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran terminal tipe b	Laporan	4	
	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	2	
	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	
	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	2	
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	124	
	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	
	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	

	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	
	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	
	Tersedianya pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	38	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Eselon Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

C. Critical Success Factors (CSF)

Critical Success Factors adalah faktor atau variabel yang kritis bagi keberhasilan pelaksanaan proyek yang harus dikerjakan dimana tanpa adanya faktor tersebut maka proyek tidak akan sukses atau berhasil dalam mencapai target atau goal tertentu pada suatu proyek atau pekerjaan.

Tipe critical Success Factors (CFS) terdiri dari :

- a. Industry critical success factors yang dihasilkan dari karakteristik industry tertentu.
- b. Strategy critical success factors yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih usaha.
- c. Environmental critical success factors yang dihasilkan dari perubahan ekonomi atau teknologi.
- d. Temporal critical success factors yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi internal dan perubahan.

Critical Success Factors adalah bagian yang tidak terlepas dari manajemen proyek dalam tingkatan perencanaan dan program yang telah dilaksanakan dalam proses pekerjaan yang terdapat sektor yang telah terlaksana dalam suatu program.

Indikator Kinerja Utama, manajemen proyek terus akan dikembangkan oleh beberapa faktor indikator yang lebih mengutamakan pencapaian target yang menjalankan program kinerja yang telah ada sebelumnya.

Tabel 2.3 Critical Success Factors 2023

1

CSF
“TERWUJUDNYA KONEKTIFITAS PROVINSI”

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersediaan angkutan umum	Meningkatnya ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat.
Kurangnya fasilitas pendukung untuk ketersediaan angkutan	Meningkatnya fasilitas pendukung untuk ketersediann angkutan umum

TERWUJUDNYA KONEKTIFITAS PROVINSI

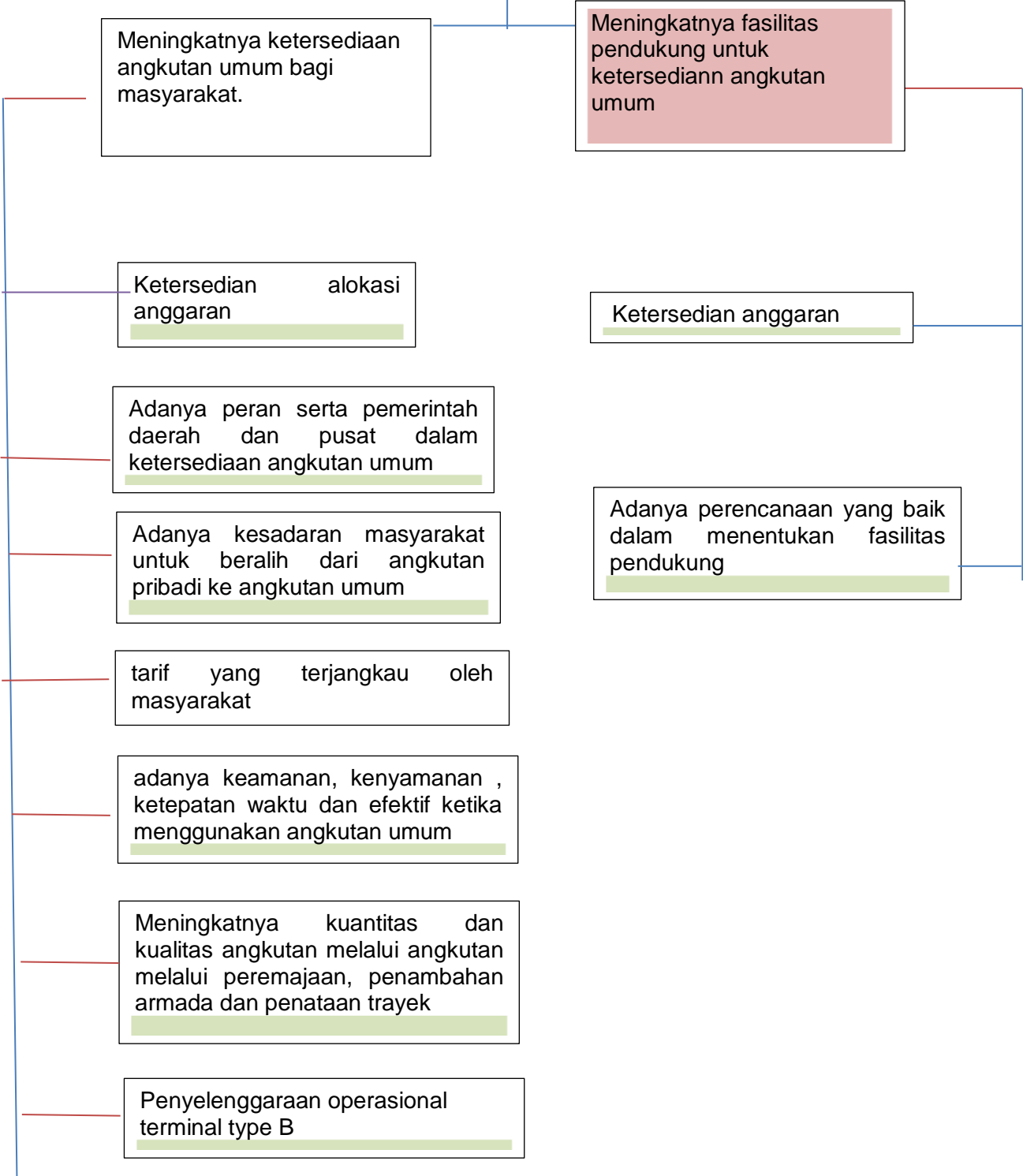
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat.

Meningkatnya fasilitas pendukung untuk ketersediann angkutan umum

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersedian alokasi anggaran • Adanya peran serta pemerintah daerah dan pusat dalam ketersediaan angkutan umum • Adanya kesadaran masyarakat untuk beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum • adanya daya tarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum • tarif yang terjangkau oleh masyarakat • adanya keamanan, kenyamanan , ketepatan waktu dan efektif ketika menggunakan angkutan umum • Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan melalui angkutan melalui peremajaan, penambahan armada dan penataan trayek

	<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan operasional terminal type B
Meningkatnya fasilitas pendukung untuk ketersediaan angkutan umum	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan anggaran• Adanya perencanaan yang baik dalam menentukan fasilitas pendukung

TERWUJUDNYA KONEKTIFITAS PROVINSI



CSF
“MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN”

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi	Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi
Kurangnya Sumber daya manusia yang paham terkait manajemen pelayanan transportasi	Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan ketepatan manajemen penyediaan layanan transportasi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik Sektor Transportasi

Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan ketepatan manajemen penyediaan layanan transportasi

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan alokasi anggaran • Peningkatan layanan angkutan umum darat dan perairan • Evaluasi kemampuan penyelenggara • Pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik Sektor Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran • Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang efektif dan efisien
Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan ketepatan manajemen penyediaan layanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan anggaran • Pelaksanaan diklat atau pelatihan terhadap SDM untuk kontrol, pengawasan dan manajemen terkait layanan transportasi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Meningkatnya On time (ketepatan waktu) layanan Transportasi

Ketersediaan alokasi anggaran

Peningkatan layanan angkutan umum darat dan perairan

Evaluasi kemampuan penyelenggara

Ketersediaan alokasi anggaran Pengembangan jumlah koridor angkutan adalomerasi

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik Sektor Transportasi

Ketersediaan alokasi anggaran

Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang efektif dan efisien

Meningkatnya Pengawasan, kontrol dan ketepatan manajemen penyediaan layanan transportasi

Ketersediaan anggaran

Pelaksanaan diklat atau pelatihan terhadap SDM untuk kontrol, pengawasan dan manajemen terkait layanan transportasi

CSF
“MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI”

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersediaan pelayanan publik	Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat

Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Transportasi

Meningkatkan nilai indeks
kepuasan masyarakat

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan anggaran - Meningkatkan pelayanan angkutan umum baik darat maupun angkutan sungai, danau dan penyelenggaran.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Transportasi

Ketersediaan anggaran

Meningkatkan pelayanan angkutan umum baik darat maupun angkutan sungai, danau dan penyelenggaran.

CSF
“MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI”

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan	Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.
Kurangnya manajemen terkait rekayasa lalu lintas	Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan

**MENINGKATKAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI**

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.

Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan penyeberangan.

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan anggaran - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. - Meningkatkan keselamatan transportasi
Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengendalian dan efektifitas kinerja dengan memperkuat koordinasi lintas sektor - Meningkatnya aktifitas andalalin. - Meningkatnya kesadaran berlalu lintas

MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas sungai danau dan penyeberangan.

Melakukan manajemen sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan penyeberangan.

Ketersedian alokasi anggaran

Meningkatkan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyelenggaraan.

Meningkatkan keselamatan transportasi

Ketersedian alokasi anggaran
Pengembangan jumlah koridor angkutan adlomerasi

Meningkatnya pengendalian dan efektifitas kinerja dengan memperkuat koordinasi lintas sektor

Meningkatnya aktifitas andalalin.

Meningkatnya kesadaran berlalu lintas

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas Indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1 Table Rentang Capaian dan Katagori Capaian

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% Sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% Sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% Sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% Sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Sumber Data: Permenpan Nomor 12 tahun 2015

1. Sasaran RPJMD

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi ke 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu Memperkuat sarana dan prasarana perekonomian dengan tujuan menetapkan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di provinsi Kalimantan selatan dengan indikator:

Tabel 3.2. Target dan realisasi sasaran tahun 2023

No	Sasaran strategis	Kinerja utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target Akhir Renstra
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	85%	82,5%	97,05%	82.2%
RATA-RATA CAPAIAN						

Sumber data: RPJMD 2021-2026

Tabel 3.3. Perbandingan Pencapaian Indikator Tahun 2021 - 2026

No	Indikator kinerja	Realisasi						Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	77,5	78,9	82,5	-	-	-	85%	82,5%	97,05%
RATA – RATA										

Sumber data: LAKIP 2022

Tabel 3.4. Perbandingan indikator terkait RPJMD dengan Nasional

No	Indikator	Perbandingan		
		Kalsel	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	82,5%	85%	83%

Sumber: kementerian perhubungan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

- Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi

Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 terealisasi Sebesar 82,5% dari target 85% sehingga persentase capaian IKM pada tahun 2023 sebesar 97,05%

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi” pada tahun 2023 terealisasi sebesar 82,5%. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 yaitu sebesar 78,9%.

Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi terealisasi sebesar 82,5%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 mengalami kenaikan.

Indeks kepausan masyarakat bidang transportasi pada level nasional yang pengukurannya dilaksanakan kementerian perhubungan memiliki target 88,4% dengan realsiasi 94,33%, yang meliputi 4 jenis transportasi yaitu darat, air, udara dan kereta api.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

3.1 Upaya yang telah dilakukan

- Pengoperasian Bus rapid Transit (BRT) secara optimal untuk memenuhi *demand* masyarakat terhadap kebutuhan transportasi yang nyaman aman, murah dan ramah terhadap gender
- Optimalisasi rekomendasi izin trayek-trayek yang dalam kewenangan provinsi yang ada di Kalimantan selatan
- Memasang dan memelihara fasilitas keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas
- Memelihara alur sungai untuk kelancara transportasi
- Melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang melakukan over dimension and over loading
- Meningkatkan pelayanan terminal tipe B

3.2 Rencana tindak lanjut

- Mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) sesuai dengan protokol kesehatan sehingga mewujudkan sarana transportasi yang nyaman, aman, murah dan ramah terhadap gender. Menjaga ketepatan waktu jadwal Bus Rapid Transit (BRT) sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan serta menetapkan titik henti yang menjadi kebutuhan masyarakat.



Lokasi titik henti dan halte Bus Rapid Transit (BRT)

Jenis Fasilitas Barang dan Jasa	Tarif
Tarif Penumpang BRT	
a. Umum Non Berlangganan	Rp. 6.000,-/Perjalanan
b. Pelajar	Rp. 2.000,-/Perjalanan
c. Umum Berlangganan	Rp. 5.000,-/Perjalanan
Tarif Iklan Halte BRT	
a. Jalan Protokol (Strategis I)	m x m x 50.000 x Hari x 25%
b. Jalan Protokol (Strategis II)	m x m x 40.000 x Hari x 25%
c. Jalan Provinsi	m x m x 35.000 x Hari x 25%
Tarif Iklan di Tv Bus	Rp. 1.000.000/3 Kali Tayang /Hari/Minggu/Bus
Tarif Iklan di Badan Bus	Rp. 3.000.000/Bulan
Periklanan di Aplikasi BRT	Rp. 500.000/Bulan

Info tariff Bus Rapid Transit (BRT)

Jadwal Jam Operasional BRT Banjarbakula Rute Banjarmasin - Banjarbaru dan Sebaliknya		
Senin-Kamis	Jumat	Sabtu-Minggu (Libur Nasional)
06.30	06.30	07.00
07.00	07.00	08.00
09.00	09.00	09.00
11.30	10.30	10.00
14.00	14.00	14.00
16.00	16.00	15.00
17.00	17.00	16.00

Jadwal Jam Operasional BRT Banjarbakula Rute Khusus		
Senin-Jumat	Sabtu-Minggu (Libur Nasional)	
05.30 (B14-B1B)	06.00 (B14-B1B)	
06.00 (B14-B1B)	06.30 (B14-B1B)	
17.30 (B1B-B14)	16.30 (B1B-B14)	
18.30 (B1B-B14)	17.30 (B1B-B14)	

Jadwal keberangkatan Bus Rapid Transit (BRT)



Surat edaran Pembatasan jumlah Penumpang BRT

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas ijin angkutan dalam trayek di Kalimantan Selatan untuk memastikan bahwa angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang beroperasi telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Kartu Pengawasan (KP) angkutan orang dalam.



Angkutan AKDP di Kalimantan Selatan

Pengawasan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek



Pengawasan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek



Pengawasan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

- c. Mewujudkan keselamatan pengguna transportasi salah satunya didukung oleh perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan terpelihara. Pemasangan perlengkapan keselamatan jalan di ruas jalan provinsi terdiri dari pemasangan PJU *smart system*, trafict light pada persimpangan jalan yang rawan kecelakaan, pemasangan rambu jalan dan pengecatan rambu jalan. Selain di pasang, perlengkapan keselamatan jalan juga dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi dari perlengkapan keselamatan jalan tersebut



PJU smart system



Rambu jalan



Pengecatan marka jalan



Pemasangan dan pemeliharaan trafict light

- d. Melaksanakan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan yang ada di Kalimantan selatan untuk kelancaran dan kenyamanan alur pelayaran



Dermaga Penyeberangan Mantuil Banjarmasin



Dermaga Penyeberangan Tamban KM.1 Kabupaten Batola



Dermaga Penyeberangan Saka Kajang Kabupaten Batola



Dermaga Batulicin Tanjung Serdang

- e. Pengaturan terhadap AKDP yang keluar masuk terminal tipe B dan penarikan retribusi pada AKDP yang masuk terminal tipe B



Penarikan Retribusi di Terminal Banua Lima



Penarikan Retribusi di Terminal Mabu'un



Penarikan Retribusi di Terminal Kersik Putih



Penarikan Retribusi di Terminal Kotabaru



Penarikan Retribusi di Terminal Pal 6



Pengaturan lalu lintas keluar-masuk Terminal

- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan yang over dimension and over loading (ODOL) untuk kelancaran arus lalu lintas dan kesesuaian penggunaan jalan di Kalimantan selatan. Kegiatan pengawasan dan penertiban ini dilaksanakan lintas sektor yaitu dengan POLRI, TNI dan dinas perhubungan Kab/Kota.



Armada angkutan Batubara yang melintas di Jalan Nasional pada wilayah hukum Kab. Tanah Laut (Kec. Jorong)



Penertiban ODOL dan Perijinan Angkutan Umum di wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan, Tapin



Kegiatan Penegakan Hukum Dimensi dan Perizinan Angkutan di Wilayah Hukum Kab Tanah Bumbu dan Kotabaru

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Transportasi pada Tahun 2023 yang dilaksanakan Dinas Perhubungan provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode survei Kepuasan Masyarakat ini meliputi:

- **Unsur Layanan**

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

- **Cakupan Survei**

Meliputi pelayanan yang ada di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pelayanan yang ada di antaranya adalah:

1. Pelayanan di BRT
2. Pelayanan di Pelabuhan
3. Pelayanan di Terminal

- **Ukuran Sampel**

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak (*random sampling*) yang ditentukan sesuai cakupan penerima layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam melakukan pengambilan sampel terdapat sistematika atau tahapan yang harus kita ikuti dengan cermat. Mengikuti dengan cermat sistematika yang ada akan membantu kita untuk menjawab tujuan dari penelitian kita. Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel:

- a. Mendefinisikan populasi yang akan diamati
- b. Menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi.
- c. Menentukan teknik atau metode sampling yang tepat
- d. Melakukan pengambilan sampel (pengumpulan data)
- e. Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling

Menurut Sugiyono pada perhitungan yang menghasilkan pecahan (terdapat koma) sebaiknya dibulatkan ke atas. Sugiono mengemukakan cara menentukan ukuran sampel yang sangat praktis, yaitu dengan tabel Krejcie. Dengan cara tersebut tidak perlu dilakukan perhitungan yang rumit. Krejcie dalam melakukan perhitungan sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi.

Tabel Krejcie

Population	Confidence level 90 per cent			Confidence level 95 per cent			Confidence level 99 per cent		
	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence	Confidence
30	27	28	29	28	29	29	29	29	30
50	42	45	47	44	46	48	46	48	49
75	59	64	68	63	67	70	67	70	72
100	73	81	88	79	86	91	87	91	95
120	83	94	104	91	100	108	102	108	113
150	97	111	125	108	120	132	122	131	139
200	115	136	158	132	150	168	154	168	180
250	130	157	188	151	176	203	182	201	220
300	143	176	215	168	200	234	207	233	258
350	153	192	239	183	221	264	229	262	294
400	162	206	262	196	240	291	250	289	329
450	170	219	282	207	257	317	268	314	362
500	176	230	301	217	273	340	285	337	393
600	187	249	335	234	300	384	315	380	453
650	192	257	350	241	312	404	328	400	481
700	196	265	364	248	323	423	341	418	507
800	203	278	389	260	343	457	363	452	558
900	209	289	411	269	360	468	382	482	605
1,000	214	298	431	278	375	516	399	509	648
1,100	218	307	448	285	388	542	414	534	689
1,200	222	314	464	291	400	565	427	556	727
1,300	225	321	478	297	411	586	439	577	762
1,400	228	326	491	301	420	606	450	596	796
1,500	230	331	503	306	429	624	460	613	827
2,000	240	351	549	322	462	696	498	683	959
2,500	246	364	581	333	484	749	524	733	1,061
5,000	258	392	657	357	536	879	586	859	1,347
7,500	263	403	687	365	556	934	610	911	1,480
10,000	265	408	703	370	566	964	622	939	1,554
20,000	269	417	729	377	583	1,013	642	986	1,688
30,000	270	419	738	379	588	1,030	649	1,002	1,737
40,000	270	421	742	381	591	1,039	653	1,011	1,762
50,000	271	422	745	381	593	1,045	655	1,016	1,778
100,000	272	424	751	383	597	1,056	659	1,026	1,810
150,000	272	424	752	383	598	1,060	661	1,030	1,821
200,000	272	424	753	383	598	1,061	661	1,031	1,826
250,000	272	425	754	384	599	1,063	662	1,033	1,830
500,000	272	425	755	384	600	1,065	663	1,035	1,837
1,000,000	272	425	756	384	600	1,066	663	1,036	1,840

N = Populasi S = Sampel (Sugiono, 2005:63)

Dari data jumlah pengguna angkutan umum pada tahun 2021 sebanyak 2.052.557 yang terdiri dari penumpang BRT, Penumpang pada Pelabuhan/dermaga yang ada dibawah kewenangan Provinsi dan penumpang pada terminal tipe B Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan jumlah tersebut maka dapat disimpulkan rata – rata sampel yang didapat berdasarkan table “Krejcie” adalah sebanyak 1.066 sampel.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak (*random sampling*) yang ditentukan sesuai cakupan penerima layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Guna terpenuhinya akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan sebanyak:

- a) 630 (enam ratus tiga puluh) responden untuk pelayanan di *Bus Rapid Transit*
- b) 500 (lima ratus) responden untuk pelayanan di Pelabuhan
- c) 500 (lima ratus) responden untuk pelayanan di Terminal

A. Metodologi dan Tahap Pelaksanaan SKM

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang diberikan.

2. Teknik Analisa Data

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dari nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pertanyaan dengan jenis data berupa data ordinal.

Nilai SKM dihitung dengan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks SKM terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki pertimbangan yang sama dengan rumus yaitu bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot dibagi jumlah unsur yaitu

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Untuk memperoleh nilai-nilai SKM berupa indeks kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus yaitu nilai total persepsi per unsur dibagi nilai total unsur yang terisi dikali nilai penimbang atau IKM total nilai persepsi per unsur/total unsur yang terisi x nilai rata-rata tertimbang.

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25 — 100 maka dilakukan konversi dengan nilai dasar 25 yaitu dengan cara SKM unit pelayanan x 25.

$$\text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Tabel 2.1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

BAB III

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Profil Responden

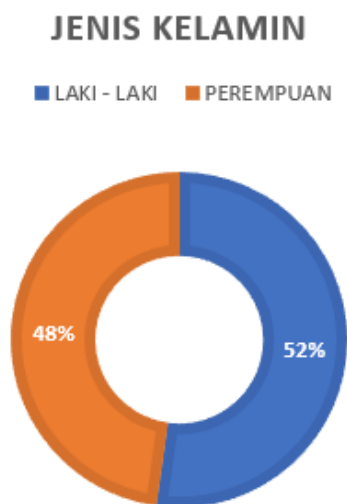
Analisis ini terhadap responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan dengan hasil sebagaimana gambar berikut:

1. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.1

Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-laki	261
Perempuan	239
Total	500



Gambar 3.1

Persentase Jenis Kelamin Responden

2. Identitas Responden berdasarkan Usia

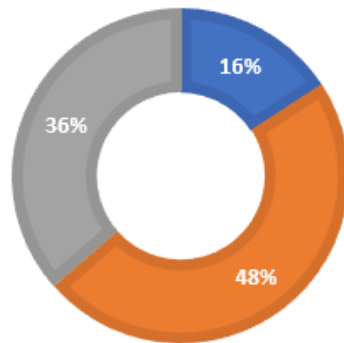
Tabel 3.2

Identitas Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (orang)
<20 th	79
20-40 th	239
>40 th	182
Total	500

USIA RESPONDEN

■ <20 Tahun ■ 20-40 Tahun ■ >40 Tahun



Gambar 3.2
Persentase Usia Responden

3. Identitas Responden berdasarkan Pekerjaan

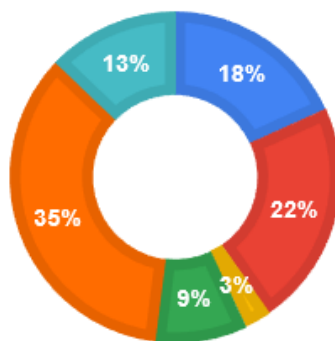
Tabel 3.3

Identitas Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
Pelajar-Mahasiswa	91
PNS	127
TNI - POLRI	13
Swasta	35
Wirausaha	160
Lainnya	74
Total	500

PEKERJA RESPONDEN

■ Pelajar-Mahasiswa ■ PNS ■ TNI - POLRI ■ Swasta ■ Wirausaha ■ Lainnya



Gambar 3.3
Persentase Pekerjaan Responden

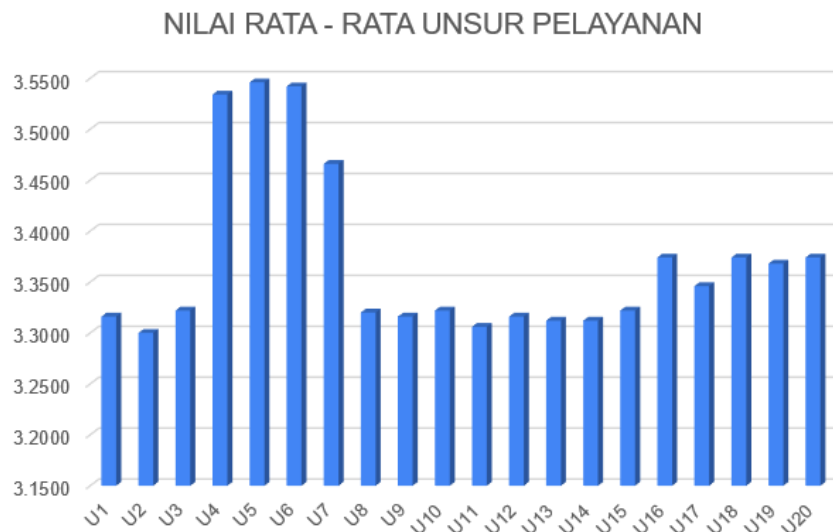
B. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pengolahan dan perhitungan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelayanan BRT (*Bus Rapid Transit*)

Tabel 3.4
Hasil Rata – Rata per Unsur Layanan *Bus Rapid Transit*

Pertanyaan	Unsur Pelayanan (Kuesioner)	Nilai Rata-Rata
U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,3160
U2	Pemahaman tentang kemudahan prosedur	3,3000
U3	Ketetapan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,3220
U4	Kewajaran harga tiket biaya/tarif dengan pelayanan jasa	3,5340
U5	Kejelasan informasi jadwal dan rute perjalanan	3,5460
U6	Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,5420
U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,4660
U8	Penanganan pelayanan pengaduan penggunaan pelayanan	3,3200
U9	Kualitas prasarana / terminal / ruang tunggu / halte	3,3160
U10	Kebersihan prasarana / terminal / ruang tunggu / halte	3,3220
U11	Fasilitas di dalam moda angkutan BRT / BTS untuk pengguna lanjut usia	3,3060
U12	Fasilitas di dalam moda angkutan BRT / BTS untuk penyandang disabilitas	3,3160
U13	Fasilitas didalam moda angkutan BRT/BTS untuk pengguna Wanita dan anak kecil	3,3120
U14	Kebersihan yang ada di dalam moda angkutan BRT	3,3120
U15	Kemudahan menuju ke Halte	3,3220
U16	Keamanan di dalam moda angkutan BRT / BTS	3,3740
U17	Cara pembayaran secara Non-Tunai di dalam moda angkutan BRT / BTS	3,3460
U18	Kemudahan dalam proses pelaksanaan pembayar non tunai	3,3740
U19	Publikasi/informasi terkait BRT kepada masyarakat	3,3680
U20	Terkait dengan rute yang sudah ada	3,3740
Rata-rata		3,3667



Gambar 3.4

Persentase Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan *Bus Rapid Transit*

Nilai Indeks Unit Pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai IKM setelah dikonversi adalah = $3,3667 \times 25 = \mathbf{84,17}$
- b) Mutu Pelayanan dengan kategori “**B**”
- c) Kinerja Unit Pelayanan “**Baik**”

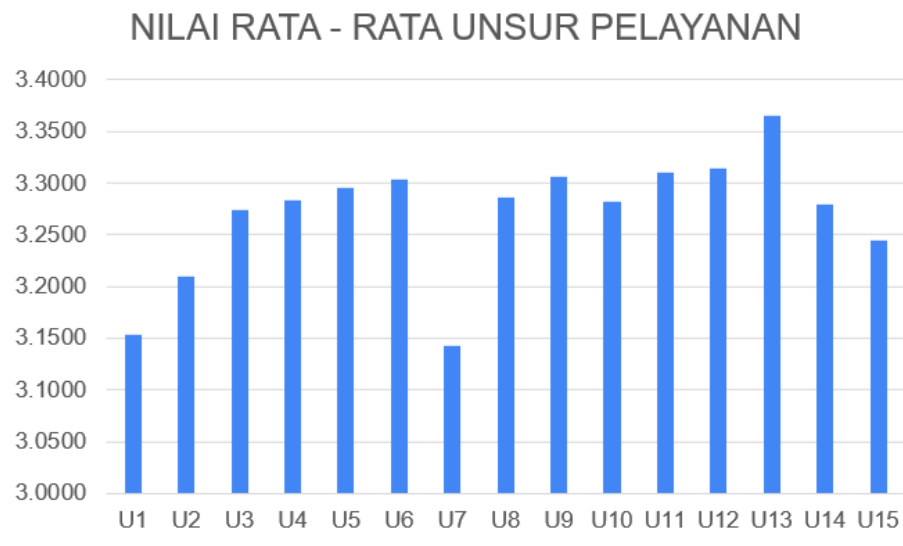
2. Pelayanan Pelabuhan

Tabel 3.5

Hasil Rata – Rata per Unsur Layanan Pelabuhan

Pertanyaan	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,1540
U2	Pemahaman tentang kemudahan prosedur	3,2100
U3	Tentang ketetapan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,2740
U4	Tentang kewajaran harga tiket biaya/tarif dengan pelayanan jasa yang diberikan	3,2840
U5	Kejelasan informasi jadwal dan rute perjalanan	3,2960
U6	Kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,3040
U7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,1429
U8	Penanganan pelayanan pengaduan penggunaan pelayanan	3,2860
U9	Kualitas prasarana / pelabuhan / ruang tunggu	3,3060
U10	Kebersihan prasarana / pelabuhan / ruang tunggu	3,2820
U11	Kondisi kenyamanan ketika berada di	3,3100

	dalam lokasi pelabuhan	
U12	Tentang fasilitas untuk penyandang disabilitas di pelabuhan	3,3140
U13	Tentang fasilitas untuk pengguna wanita dan anak kecil	3,3660
U14	Kemudahan menuju ke pelabuhan yang ada	3,2800
U15	Kondisi keamanan ketika berada di dalam lokasi pelabuhan	3,2440
Rata-rata		3,2772



Gambar 3.5

Persentase Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pelabuhan

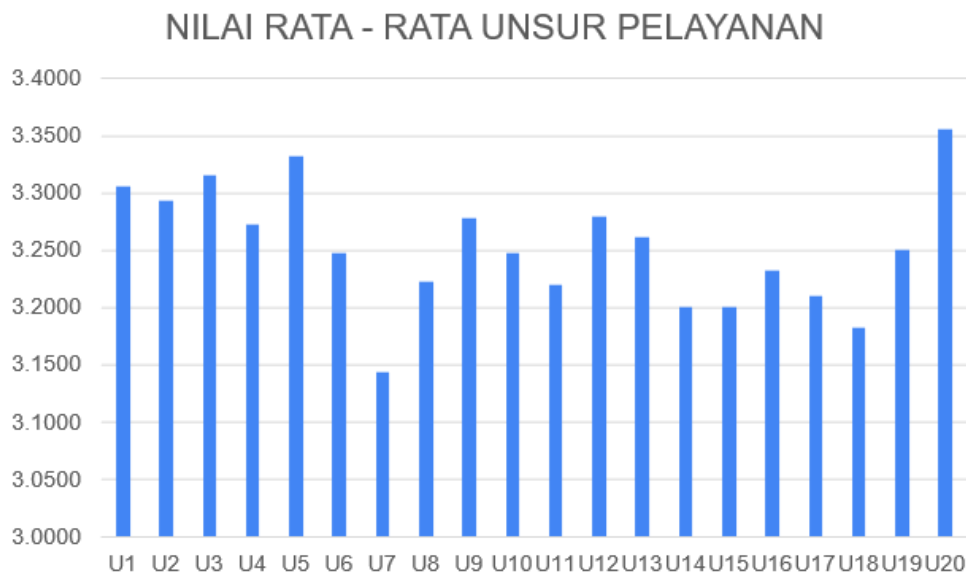
Nilai Indeks Unit Pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai IKM setelah dikonversi adalah = $3,2772 \times 25 = \mathbf{81,93}$
- b) Mutu Pelayanan dengan kategori “**B**”
- c) Kinerja Unit Pelayanan “**Baik**”

3. Pelayanan Terminal

Tabel 3.6
Hasil Rata – Rata per Unsur Layanan Terminal

Pertanyaan	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,3060
U2	Pemahaman tentang kemudahan prosedur	3,2940
U3	Tentang ketetapan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,3160
U4	Tentang kewajaran harga tiket biaya/tarif dengan pelayanan jasa yang diberikan	3,2720
U5	Tentang kejelasan informasi jadwal dan rute perjalanan	3,3320
U6	Tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	3,2480
U7	Tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,1429
U8	Tentang penanganan pelayanan pengaduan penggunaan pelayanan	3,2220
U9	Tentang kualitas Prasarana/Terminal/ ruang tunggu/ halte	3,2780
U10	Tentang Kebersihan Prasarana/Terminal/ ruang tunggu/ halte	3,2480
U11	Tentang kualitas Prasarana Terminal terkait fasilitas umum yang tersedia	3,2200
U12	Kondisi keamanan dan kenyamanan ketika berada di dalam lokasi terminal penumpang	3,2800
U13	Tentang ketersediaan moda angkutan yang diinginkan	3,2620
U14	Terkait fasilitas didalam terminal untuk pengguna lanjut usia	3,2000
U15	Tentang fasilitas di dalam terminal untuk penyandang disabilitas	3,2000
U16	Tentang fasilitas didalam terminal untuk tempat lactase dan ruang bermain anak	3,2320
U17	Ketersedian lahan parkir untuk penumpang	3,2100
U18	Kemudahan menuju ke terminal penumpang yang ada	3,1820
U19	Tentang keamanan di dalam terminal	3,2500
U20	Tentang kemudahan dalam memperoleh tiket	3,3560
Rata-rata		3,2850



Gambar 3.6

Persentase Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Terminal

Nilai Indeks Unit Pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai IKM setelah dikonversi adalah = $3,2850 \times 25 = \mathbf{81,45}$
- b) Mutu Pelayanan dengan kategori **“B”**
- c) Kinerja Unit Pelayanan **“Baik”**

Nilai rata-rata dari hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapat dari 3 (tiga) pelayanan, yaitu: pelayanan BRT (*Bus Rapid Transit*), pelayanan Pelabuhan dan pelayanan terminal adalah sebesar 81,45. Sehingga bisa disimpulkan pelayanan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan **“Baik”**

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan sebelum tahun 2023, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayanan
4. Program Pengelolaan Pelayanan Perkeretaapian

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.9 Sasaran Strategis Kepala Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Terwujudnya konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas provinsi	0,59	0,603	102%
2	Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	<i>On time performance</i> layanan transportasi (Darat dan Air)	58,5	55,5	94,87%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	85	82,5	97,05%
3	Meningkatkan keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dengan kematian per 100.000 keberangkatan	2,65	1.2	90,2%
RATA-RATA CAPAIAN					95,20%

Sumber Data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Rumus Perhitungan :

- Rasio Konektivitas Provinsi

$$\text{Rasio} = (\text{Ktpel} + \text{Ktkot} + \text{Ktdar}) = 0.603$$

Ktpel = Konektivitas Transportasi Pelayaran Bobot 30%
Jumlah Lintas penyebrangan yang dilayani dibandingkan dengan jumlah lintas penyebrangan yang ditetapkan

Ktkot= Konektivitas Transportasi Perkotaan Bobot 20%
Jumlah trayek AKDP yang beroperasi dibandingkan jumlah kebutuhan trayek AKDP yang ditetapkan

Ktdar= Konektivitas Transportasi darat Bobot 50%
Jumlah Koridor BRT yang beroperasi disbanding jumlah koridor yang di tetapkan

- One Time Performance Layanan Transportasi Darat dan Air

OTP Perkotaan Berbasis jalan
Nilai OTP di 10 Koridor di banjarbakula
Dimana

6 = Seluruh layanan BRT di 10 KORIDOR Tepat waktu

0 = Seluruh layanan BRT di 10 KORIDOR Belum Tepat waktu

$$\text{Perhitungan} = 6/10 = 0.6$$

- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

- Metode Survey

- Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dengan Kematian Per 100.000

Keberangkatan

Rasio kejadian kecelakaan transportasi AKDP

Rasio kejadian kecelakaan transportasi pelayaran

Rasio kejadian kecelakaan transportasi perkotaan

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan} = \text{AKPD} &= 0/10.000 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pelayaran} &= 0/10.000 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perkotaan} &= 0/10.000 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{AKPD}) + (\text{PEL}) + (\text{KTA}) &= 0 * 100.000/3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					TAHUN 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Rasio konektivitas provinsi	0,5987	0,603	-	-	-	0,61	0,603	98,85%
2	<i>On time performance</i> layanan transportasi (Darat dan Air)	0,166	75,5	-	-	-	58,5	55,5	94,87%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	77,5%	78,9%	-	-	-	85%	82,5%	97,05%
4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dengan kematian per 100.000 keberangkatan	77,5%	3,075	-	-	-	2,6%	1,2 %	90,2%
RATA – RATA									95,20%

Sumber Data : Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Provinsi

Kalimantan Selatan

Tabel 3.12 Perbandingan Kinerja dengan Nasional

NO	INDIKATOR	PERBANDINGAN			
		TARGET NASIONAL	REALISASI NASIONAL	TARGET KALSEL 2023	REALISASI KALSEL 2022
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0.763	0.57	0.61	0,603
2	On Time Performance Layanan Transportasi	75,84	60,44	58.5	55,5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	88,4	94,33	85	82,5
4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan (Kuesioner)	20.94	18,26	2.6	1.2

Sumber Data : eperformance kementerian perhubungan

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

a. Rasio Konektivitas Provinsi

Masing masing realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Rasio Konektivitas provinsi pada tahun 2023 sebesar 0.603% dengan target yang ditetapkan yaitu 0.61% sehingga persentase capaian sebesar 98,85%.

b. On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air)

Pada Indikator Kinerja yaitu On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air) pada tahun 2023 sebanyak 55,5 dengan target yang ditetapkan yaitu 58,5 sehingga persentase capaian sebesar 94,87%.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Pada Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2023 sebanyak 82,5% dengan target yang ditetapkan yaitu 85% sehingga persentase capaian sebesar 101%.

d. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan

Pada indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan Pada Tahun 2023 Sebesar 1,2 Dengan Target Yang Ditetapkan yaitu 2,65 Sehingga persentase capaian sebesar 90,2 %

2) Perbandingan Realisasi dengan realisasi terkait

Pada tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi yang pada tahun 2023 targetnya sebesar 81,5%. Capaian dari target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 82,5%, capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami Kenaikan yaitu 3,6%. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Nasional pada tahun 2023 memiliki target 88,4% dengan capaian target sebesar 94,33%.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan

a. Rasio Konektivitas Provinsi

Transportasi merupakan sistem pendukung yang menghubungkan berbagai fungsi ruang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda pula. Baik fungsi ekonomi, fungsi sosial/budaya, serta fungsi lingkungan. Ketiga aspek ini juga merupakan unsur utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep transportasi yang berkelanjutan pada akhirnya memang tidak dapat terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Rasio Konektivitas dilihat dari jumlah daerah yang di layani oleh sarana transportasi. Dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0676/KUM/2014 tentang Penetapan jaringan Trayek dan Operasi Angkutan Orang di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 35 Trayek, sedangkan trayek yang dilayani sebanyak 21 Trayek. Jumlah trayek Bus rapid Transit sebanyak 6 Koridor (Trayek) sedangkan yang terlayani yaitu 1 Koridor (trayek).

b. On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air)

On time performance layanan transportasi yang dikelola oleh dinas perhubungan yaitu bus rapid Transit (BRT) sebesar 0,6, yang mana hasil tersebut disebabkan dari 10 koridor brt yang ada baru 6 yang beroperasi, namun trayek tersebut beroperasi secara tepat waktu dan jadwal.



Lokasi titik henti dan halte Bus Rapid Transit (BRT)

Jadwal Jam Operasional BRT Banjarbakula
Route Banjarmasin - Banjarbaru dan Sebaliknya

Senin-Kamis	Jumat	Sabtu-Minggu (Libur Nasional)
06.30	06.30	07.00
07.00	07.00	08.00
09.00	09.00	09.00
11.30	10.30	10.00
14.00	14.00	14.00
16.00	16.00	15.00
17.00	17.00	16.00

Jadwal Jam Operasional BRT Banjarbakula
Route Khusus

Senin-Jumat	Sabtu-Minggu (Libur Nasional)
05.30 (B1P-B1B)	06.00 (B1P-B1B)
06.00 (B1P-B1B)	06.30 (B1P-B1B)
17.30 (B1B-B1P)	16.30 (B1B-B1P)
18.30 (B1B-B1P)	17.30 (B1B-B1P)

brt_banjarbakula www.dishub.kalselprov.go.id 0899-9009-820

Jadwal keberangkatan Bus Rapid Transit (BRT)

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Tahun 2023 dinas perhubungan melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi mengalami kenaikan 3,6%, dengan capaian 82,5 % dengan target 85%.

d. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan

Capaian indikator kinerja tersebut tercapai 95,20%, hal ini dikarenakan dukungan program dan kegiatan yang memenuhi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, pengawasan angkutan yang sesuai peruntukan dan izinnya baik angkutan darat dan air.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Pelayaran
- Program Pengelolaan Perkeretaapian

3. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.14. Sasaran Strategis Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%
		Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	100%	100%	100%
3	Peningkatan kualitas SDM OPD	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawian	100%	100%	100%
		Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	100%	100%	100%
		Persentase peserta pelatihan / bimtek yang paham	100%	100%	100%
4	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran SOPD	100%	96,50%	96,50%
		Persentase aset yang tercatat	100%	97,69%	97,69%
Rata-Rata Capaian					99,27%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Rumus Perhitungan :

- Pesentase Aset Yang Tercatat

Jumlah Aset Yang Dicatat bagi jumlah Asset seluruhnya X 100% :

$$\frac{\text{Jumlah Asset Yang Dicatat}}{\text{Jumlah Asset Seluruhnya}} \times 100\%$$

- Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Perhubungan

Jumlah sarana prasarana yang ada dibagi jumlah sarana prasarana yang di butuhkan X 100%

$$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang ada}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang di butuhkan}} \times 100\%$$

- Persentase penyerapan anggaran Dinas Perhubungan
Jumlah Realisasi anggaran dibagi dengan rencana anggaran X 100%

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 3.15 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sekretaris

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SOPD	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%
6	Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LAKIP SOPD	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%
7	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawian	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%
8	Persentase ASN SOPD yang memiliki sertifikat keahlian	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%
	Persentase	-	100	-	-	-	100%	100%	100%

	peserta pelatihan / bimtek yang paham		%						
	Persentase penyerapan anggaran SOPD	93,22 %	100 %	-	-	-	100%	96,50%	96,50%
	Persentase aset yang tercatat	-	100 %	-	-	-	100%	97,69%	97,69%
Rata – Rata Capaian									99,27%

Sumber Data : Laporan Pengukuran Kinerja TAhun 2023

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum capaian kinerja Sekretaris keseluruhan tercapai 99,27% dari yang telah di targetkan sehingga realisasi kinerja sekretaris pada tahun 2023 yaitu 99,27%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2023 Persentase Penyerapan Anggaran SOPD pada tahun 2023 targetnya sebesar 100%%. Capaian dari target Persentase Penyerapan Anggaran SOPD pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,50%, capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami Penurunan yaitu 3,5%.

Pada tahun 2023 Persentase aset yangt tercatat pada tahun 2023 targetnya sebesar 100%. Capaian dari target Persentase aset yang tercatat pada tahun 2023 yaitu sebesar 97,69%, capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan 2,31% dari capaian tahun 2022.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya -Upaya yang Telah Dilakukan

- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- Penataan organisasi dan tata laksana;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- Koordinasi Penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah

3.2 Hambatan Dalam Penjapaian Kinerja

- Dalam upaya memudahkan pencapaian kinerja di sekretariat diperlukan SDM yang dapat memberikan daya dukung tambahan di sekretariat hal ini dikarenakan terdapat Pegawai pensiun yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja yang telah di tetapkan.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Menganalisis kebutuhan Kesekretariatan dalam mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023;
- Menyiapkan perencanaan kinerja dan anggaran pada tahun anggaran 20223;
- Mengoptimalkan SDM pada sekretariat untuk mencapai target tahun 2023.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja Sekretaris

Dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Reviu Renstra Dinas Perhubungan dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis outcome
2. Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan
3. Meningkatkan pencatatan aset, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap Dinas Perhubungan
4. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Melaksanakan perekrutan tenaga honorer yang kompeten dan berkualitas, guna mengisi kebutuhan SDM dan memperkuat performa dan kinerja.

3.1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.16 Sasaran Strategis Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

No	Kinerja Utama	Indikator	Target dan Capaian		
			Target	Realisasi s.d Bulan ini	Capaian (%)

1	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	60 Paket	60 Paket	100%
2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14 orang	14 Orang	100%
3	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bagnunan kantor yang dsediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	12 Paket	100%
6	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
8	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Terlaksanya dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik SKPD	Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
10	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
11	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	100%
12	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%
13	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%

14	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	100%
15	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitas saranadan prasarana gedung kantoratau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 60 Paket

Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 14 Orang

Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 Bulan

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 9 Paket

Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan 12 Bulan

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan 12 Bulan

Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 Bulan

Jumlah Website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Bulan

Jumlah paket mebel yang disediakan 1 Paket

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan

Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan

JumlahKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kinerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian memiliki kinerja yang fokus melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memantau dan mengevaluasi, menganalisis, memfasilitasi, menginventarisasi permasalahan bidang tata usaha kepegawaian.

Kinerja pelayanan rumah tangga terlaksana dengan pengadaan, alat tulis kantor secara berkala, meja, kursi, komputer, printer, dan alat teknik.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

1. Penyelenggaraan administrasi perkantoran, kepegawaian, dan sarana/prasarana menunjang Kelancaran Adminsitration Perkantoran dan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur, menunjang kelancaran tugas perkantoran Dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, terciptanya kualitas kompetensi SDM Kantor untuk menunjang meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.
2. Lingkungan kerja adalah kondisi tempat karyawan bekerja. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Jika lingkungan kerja nyaman dapat membuat karyawan lebih fokus dan mudah dalam mencapai kinerja maksimal. Lingkungan kerja juga dapat diartikan sebagai suasana kerja. Suasana yang suportif akan membuat produktivitas karyawan lebih tinggi dibandingkan suasana kerja yang tidak suportif.
3. Fasilitas kerja sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Semakin baik fasilitas kerja yang diberikan, maka karyawan akan semakin terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sehingga kinerja yang dihasilkan juga semakin baik. Fasilitas kerja yang diberikan harus sesuai dan mumpuni terhadap pekerjaan.
4. Pelatihan dan juga edukasi sangatlah penting untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan, khususnya untuk karyawan baru dan masih memerlukan suatu bimbingan. Sedangkan untuk karyawan lama, mereka biasanya memerlukan peningkatan kinerja seiring berjalannya waktu.

Dokumentasi :



3.2 Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset

Tabel 3.17 Sasaran Strategis Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Tersediannya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Tersediannya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Tersediannya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Tersediannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	100%

	laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
7	Terlaksannya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
10	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
11	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2023

Tabel 3.18 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan Keuangan dan Aset

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD								
3	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	-	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
8	Jumlah orang yang menerima gaji an tunjangan tugas ASN	-	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
9	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

10	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
11	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian									100%

Sumber data : -

1).Perbandingan Realisasi dengan Target

- Pencapaian indikator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah terealisasi sebesar 1 Dokumen dari target 1 Dokumen sehingga capaian sebesar 100%.
- Pencapaian indikator jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian sebesar 100%.
- Pencapaian indikator jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordiansi penyusunan dokumen RKA-SKPD terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator jumlah dokumen DPA-SKPD dan laposan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terealisasi 1 laporan dari target 1 laporan sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah terealisasi sebesar 17 dokumen dari target 17 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- Pencapaian indikator jumlah orang yang menerima gaji tunjangan tugas ASN terealisasi 12 bulan dari target 12 bulan sehingga capaian 100%
- Pencapaian indiaktor jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN terealisasi sebesar 12 dokumen dari target 12 dokumen sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD terealisasi sebesar 1 laporan dari target 1 laporan sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indiaktor Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD terealisasi sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%
- Pecapaian indikator Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD terealisasi sebesar 1 laporan dari target 1 laporan sehingga capaian kinerja 100%

2).Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbedaan indikator kinerja antara tahun 2022 dengan 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi anantara indikator 2022 dengan 2023.

3).Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya -Upaya yang Telah Dilakukan

- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;
- Koordinasi Penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah

4).Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan salah satunya koordinasi yang dilakukan terkait perencanaan program, kegiatan dan penganggaran. Koordinasi yang di lakukan baik dalam lingkup dinas perhubungan hingga antar SKPD terkait penganggaran, perencanaan program kegiatan, serta capaian kinerja yang ditetapkan. Pencapaian kinerja 100% pada sub bagaian perencanaan keuangan dan aset pada tahun 2023 merupakan berkat kinerja dan koordinasi yang baik semua pihak di sub bagaian perencanaan keuangan dan aset dengan semua bidang di dinas perhubungan provinsi Kalimantan selatan.

4. Kepala Bidang Pelayaran

Tabel 3.19. Sasaran Strategis Kepala Bidang Pelayaran

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas ketertiban, keselamatan dan kelancaran transportasi perairan	Persentase moda transportasi air laik berlayar	70%	70,62%	100%
		Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar	25,64%	23,07%	89,99%
		Persentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (<i>crosscutting</i> kepolisian daerah)	35%	30%	85,71%
		Persentase kecelakaan angkutan perairan (fatality accident)	0%	0%	100%
		Persentase Ontime Performance (OTP) Trayek Lintas Perairan	66%	66%	100%
Rata-Rata Capaian					95,14%

Sumber data : Laporan Kinerja bulana desember 2023

Rumus perhitungan :

- Persentase Moda Transportasi air laik berlayar

$$\frac{A}{B} \times 100\%$$

A= Jumlah moda transportasi air laik jalan

B= jumlah moda transportasi air yang beroperasi

- Pesentase Prasarana Pelabuhan Yang Memenuhi Standar

$$\%SD = \left(\frac{Ss}{So} \times 100\%\right)$$

Ss= Jumlah pelabuhan yang memenuhi standar

So= jumlah Seluruh pelabuhan yang beroperasi

- Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban Lintas Perairan (Crosscuting kepolisian Daerah)

$$\frac{(n - n1)}{n1} \times 100$$

n= Jumlah kejadian tahun sekarang

n1= Jumlah kejadian tahun sebelumnya

- Pesentase Kecelakaan Lintas Perairan (Fatality Accindent)

$$\frac{A}{B} \times 100$$

A= Kejadian kecelakaan angkutan umum dengan *fatality accident*

B= per 100.000 Keberangkatan

- Rasio Ketepatan Waktu Tempuh Trayek Lintas Perairan

$$\frac{A}{B}$$

A= Jumlah angkutan umum yang tepat waktu

B= jumlah angkutan umum yang melaksanakan perjalanan

Tabel 3.20. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bidang Pelayaran

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase moda transportasi air laik berlayar	100%	67,03%	-	-	-	70%	70,62%	100%
2	Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standar	100%	23,07%	-	-	-	25,64%	23,07%	89,99%
3	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban	100%	35%	-	-	-	35%	30%	85,71%

	lintas perairan (<i>crosscutting</i> kepolisian daerah)								
4	Persentase kecelakaan angkutan perairan	100%	0%	-	-	-	0%	0%	100%
5	Rasio ketepatan waktu tempuh trayek lintas perairan	70%	66%	-	-	-	66%	66%	100%
Rata – Rata Capaian									95,14%

Sumber data :Lakip tahun 2022

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi secara keseluruhan untuk 5 indikator yang ditetapkan, 3 indikator sesuai target sedangkan 2 lainnya belum bisa memenuhi target.

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait

- Persentase prasarana pelabuhan yang memenuhi standard, realisasi sebesar 23,07 % dari target 25,64 % yang berarti didapat persentase capaian sebesar 89,99 %.
- Persentase moda transportasi air laik berlayar, realisasi sebesar 70,62 % target 70 % yang berarti didapat persentase capaian sebesar 100 %.
- Presentase penurunan pelanggaran ketertiban lintas perairan (*crosscutting* kepolisian), realisasi sebesar 30 % dari target 35 % yang berarti didapat persentase capaian sebesar 85,71 %.
- Presentase kecelakaan angkutan perairan (*fatality accident*), realisasi sebesar 0 % dari target 0 % yang berarti didapat persentase capaian sebesar 100 %.
- Presentase on time performance (OTP) trayek lintas perairan, realisasi sebesar 33,33 % dari target 66 % yang berarti didapat persentase capaian sebesar 75,76 %.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pencapaian kinerja pada tahun ini untuk sebagian besar indikator telah memenuhi target. Pencapaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan.

4) Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Segala bentuk program kegiatan yang direncanakan dengan seksama, terperinci dan terukur baik secara administrasi maupun teknis dapat diwujudkan dengan dukungan anggaran, kerjasama internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi informasi.



4.1 Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran

Tabel 3.21 Sasaran Strategis Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharannya	9 Unit	8 Unit	89%
2	Terawasinya pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi.	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata Rata Capaian			94,5%		

Sumber data : Laporan Kinerja bulan desember 2023

Tabel 3.22 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Angkutan Pelayaran

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Targer	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharannya	-	-	-	-	-	9 Unit	8 Unit	89%
2	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang	-	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%

melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi.									
Capaian	94,5%								

Sumber Data : -

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Capaian realisasi secara keseluruhan sudah cukup memadai dengan target rencana kegiatan yaitu sebesar 94,5 % yaitu :

- Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharannya.
- Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi.

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait

- Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi yang dilakukan pengoperasian dan pemeliharannya dengan capaian 89 %
- Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi dengan capaian 100 %

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kondisi yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan Kinerja pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi dan kegiatan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi dapat ditentukan oleh pasang surut air sungai, alat operasional, SDM yang kompeten dan juga waktu yang disediakan.

4) Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan kerjasama yang baik dengan Instansi yang terkait. Disamping itu dukungan masyarakat setempat dan anggaran yang cukup sehingga kegiatan bisa berjalan dengan maksimal.

Foto-Foto :

Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi (Pembersihan Alur).

1. Kegiatan Pembersihan alur di Sungai Luang Kecamatan Babarik Kabupaten Hulu Sungai Utara.



2. Kegiatan Survei di Sungai Sambujur menuju Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara



3. Kegiatan Pembersihan Alur di Sungai Rintisan menuju Pal Batu Kabupaten Hulu Sungai Utara



4.2 Kepala Seksi Prasarana Pelayaran

Tabel 3.23 Sasaran Strategis Kepala Seksi Prasarana Pelayaran

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tersedianya data dan informasi jaringan lintas pengoperasian kapal penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam daerah provinsi	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas Pelabuhan antar daerah kab/kota dalam daerah provinsi	5 Lintasan	5 Lintasan	100%
Rata – Rata Capaian					100%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Tabel 3.24 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Seksi Prasarana Pelayaran

No	Indikator Kinerja	Realisasi					2022		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% capaian
1	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyebrangan dan disetujuinya pengoperasian kapal penyebrangan lintas Pelabuhan antar daerah kab/kota dalam daerah provinsi	100%	100%	-	-	-	5 Lintasan	5 Lintasan	100%

Sumber data : LAKIP 2022

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Perbandingan realisasi dengan target yang telah disusun dan direncanakan sudah sesuai yaitu mencapai 100%;

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Dari perbandingan realisasi dengan realisasi terkait bahwasanya sudah 5(lima) lintasan yang telah terdata dari 5 (lima) lintasan yang direncanakan yaitu lintas penyeberangan :

1. Tamban – Mantuil;
2. Banjarraya – Saka Kajang;
3. Banjarraya – Sungai Lauk;
4. Alalak – Jelapat;
5. Batulicin – Tanjung Serdang

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kondisi yang mempengaruhi Peningkatan dan Penurunan Kinerja Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dapat ditentukan oleh kesiapan rencana kegiatan dan kesiapan personil serta sarana penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas termasuk penganggaran dalam kegiatan.

4) Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Segala bentuk program kegiatan yang telah direncanakan dengan seksama, terperinci dan terukur baik secara administrasi maupun teknis dapat diwujudkan dengan disertai dengan Ketekunan, keuletan dan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban oleh para pelaksana tugas.

Foto-Foto Kegiatan

Kegiatan bulan Oktober, Lintas Penyeberangan Alalak – Jelapat



4.3 Kepala Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa

Tabel 3.25 Sasaran Strategis Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tersedianya Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Memenuhi Syarat Perizinan	20 Unit	20 Unit	100%
Rata – Rata Capaian					100%

Sumber data : Laporan Kinerja Bulan Desember tahun 2023

Tabel 3.25 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Seksi Angkutan Pelayaran dan Bina Usaha Jasa

No	Indikator Kinerja	Realisasi					2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	Persentase capaian
1	Jumlah Fasilitas Rekomendasi izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Di Terbitkan	-	100%	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Terkait Angkutan Perairan yang diterbitkan	-	107%	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	-	-	-	-	-	5	5	100%

	Elektronik								
4	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Memenuhi Syarat Perizinan	-	-	-	-	-	20	20	%
Rata – Rata Capaian									100%

Sumber data : -

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Realisasi secara keseluruhan untuk 2 indikator sudah memenuhi target Triwulan IV yaitu sebesar 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait

- Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait yang disusun adalah 5 dokumen.
- Target 5 dokumen yang diterbitkan atau 100% telah direalisasikan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pencapaian kinerja pada tahun ini bisa memenuhi target triwulan IV sebesar 100 %. Namun demikian diharapkan pada tahun mendatang pencapaian dapat dipertahankan dengan bekerja lebih keras, lebih efektif dan efisien dengan alternatif solusi berupa pola kerjasama yang baik dengan instansi terkait lainnya lintas kewenangan untuk mengatasi kendala berupa luasnya jangkauan lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran.

4) Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa terkait dan angkutan laut pelayaran rakyat disebabkan oleh sebaran lokasi kegiatan serta keterbatasan anggaran. Namun demikian, diupayakan optimalisasi hasil kegiatan melalui pemanfaatan media online dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan bantuan.



Peninjauan Lapangan ke kapal Perintis Pelabuhan Stagen



Operasional kapal Pelayaran Rakyat Di Pelabuhan panjang KotaBaru



Kondisi Kapal – Kapal Pelayaran Rakyat Di Sungai Satui

5. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Tabel 3.26 Sasaran Strategis Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Keselamatan, Keamanan, dan Kelancaran Lalu Lintas	Persentase Angkutan Umum yang lulus Uji KIR / Laik Jalan (20.500)	100%	100%	100%
		Persentase Kecelakaan Angkutan Umum di Jalan (Fatality Accident)	0%	100%	100%
		Persentase Penurunan Angkutan Umum yang melanggar ketertiban lalu lintas	100%	100%	100%
		Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2023

Tabel 3.26 Target, Realisasi dan Capaian Indikator
Kinerja Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Angkutan Umum yang lulus Uji KIR / Laik Jalan (20.500)	-	74%	-	-	-	100%	100%	100%
2	Persentase Kecelakaan Angkutan Umum di Jalan (Fatality Accident)	-	0%	-	-	-	0	100%	100%
3	Persentase Penurunan Angkutan Umum yang melanggar ketertiban lalu lintas	-	96%	-	-	-	100%	100%	100%
4	Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian									100%

Sumber data : -

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Pada indikator Persentase Angkutan Umum yang lulus uji KIR / Laik Jalan (20.500) dengan target 28.000 Unit tercapai 28.000 Unit dengan persentase capaian 100%
- Pada indikator Persentase Kecelakaan Angkutan Umum Di jalan (Fatality Accident) dengan target 0% tercapai 0 kali dengan persentase capaian 100%.
- Pada indikator Persentase Penurunan Angkutan Umum yang melanggar ketertiban lalu lintas dengan target 100 unit tercapai 100 unit dengan persentase 100%
- Pada indikator persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa dengan target 21 ruas tercapai 21 ruas dengan persentase 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator Persentase Angkutan Umum yang lulus Uji KIR / Laik Jalan Data dari unit kendaraan bermotor yang ada di Kalimantan Selatan

Indikator Persentase Kecelakaan Angkutan Umum di jalan (Fatality Accident) Data berdasarkan Data Sekunder dari kepolisian

Indikator Persentase penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas, Dari target 12 Laporan telah terealisasi Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Perizinan Angkutan di 4 ruas jalan Kabupaten Tapin dan Kabupaten

Hulu Sungai Selatan serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta kegiatan pengamanan lalu lintas jalan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV sebanyak 20 kali kegiatan.

Indikator Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa Data jumlah 21 ruas yang telah dilakukan survey penataan lalu lintas, andalalin dan rekomendasi koordinasi forum LLAJ dari target 21 Ruas Jalan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Persentase Angkutan Umum yang lulus uji KIR / LAIK Jalan (20.500)

- Kepatuhan Pemilik dan awak kendaraan umum
- Kesiapan UPPKB di kab/kota

3.2 Persentase kecelakaan angkutan umum di jalan (fatality accident)

- Fasilitas keselamatan jalan yang terpasang
- Disiplin pengguna jalan khususnya angkutan umum

3.3 Persentase Penurunan angkutan umum yang melanggar ketertiban lalu lintas

- Peningkatan :

Memperketat pengawasan kendaraan dengan melaksanakan pemeriksaan Buku KIR Kendaraan yang dipermudah dengan sistem BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) yang terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC untuk mendorong kendaraan angkutan barang/penumpang umum agar menyesuaikan dengan sertifikasi Uji Tipe (SERUT).

- Penurunan :

Sedangkan penurunan kinerjanya yaitu semakin ditemukan kendaraan angkutan umum barang yang buku Uji kendaranya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan sertifikasi Uji Tipe (SERUT).

3.4 Persentase ruas jalan provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa

- Peningkatan :

Peningkatan VC Ratio pada pada ruas jalan provinsi minimal mempertahankannya dengan semakin banyaknya volume lalin, dan perbaikan indikator indikator Indek Tingkat Pelayanan Jalan.

- Penurunan :

Penurunan Indek Tingkat Pelayanan Jalan di ruas jalan provinsi yang dikarenakan semakin tingginya volume lalin kendaraan dan semakin berkembangnya pembangunan di daerah.



4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan sebagai penunjang kinerja Bidang Lalu Lintas Jalan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan supervisi UPPKB kab Kota
- b. Sosialisasi dan pengawasan / penegakan hukum
- c. Program sosialisasi keselamatan
- d. Rencana aksi keselamatan daerah
- e. Program penghargaan AKUT
- f. Sosialisasi dan Pengawasan / penegakan hukum
- g. Dukungan program lanjutan untuk tidak lanjut mitigasi
- h. Pengadaan perlengkapan dan peralatan survey

5.1 Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas

Tabel 3.27 Sasaran Strategis Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan provinsi kalimantan selatan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	12Ruas	12	100%
Rata Rata Capaian					100%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember tahun 2023

Tabel 3.28 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah ruas jalan provinsi yang diawasi dan dikendalikan efektifitas pelaksanaan kebijakannya untuk jalan provinsi	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang meliputi	-	-	-	-	-	12 Laporan	12	100%
Rata Rata Capaian									100%

Sumber data : LAKIP 2022

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2023 indikator yang menjadi target pada seksi operasional dan pengendalian lalulintas jalan yaitu Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi yang meliputi dengan target 12 laporan. Realisasi dari target yang ditetapkan yaitu 12 laporan dengan capaian 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait

Dari target 12 Laporan telah terealisasi Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Perizinan Angkutan di 3 ruas jalan pada Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kotabaru dan kegiatan pengamanan lalu

lintas jalan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV sebanyak 11 kali kegiatan

3) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Peningkatan :

Memperketat pengawasan kendaraan dengan melaksanakan pemeriksaan Buku KIR Kendaraan yang dipermudah dengan sistem BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) yang terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC untuk mendorong kendaraan angkutan barang / penumpang umum agar menyesuaikan dengan Sertifikasi Uji Tipe (SERUT).

Penurunan :

Sedangkan penurunan kinerjanya yaitu semakin banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang Buku Uji Kendaraannya habis masa berlaku yang disebabkan ketatnya uji kelulusan di UPPKB dengan mempersyaratkan ukuran standart kendaraan harus sesuai dengan Sertifikasi Uji Tipe (SERUT)

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program : Penyelenggaraan lalu lintas jalan dan Angkutan Jalan

Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi.

Dari pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan kendaraan lebih mudah dengan adanya sistem BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) namun lebih banyak kendaraan yang belum lulus uji karena ketatnya persyaratan lulus uji dengan standarisasi kendaraan.

Utuk meningkatkan kinerja masih diperlukan penambahan petugas PPNS dan kelengkapan pemeriksaan kendaraan yang salah satu contohnya adalah Timbangan Portable, Kendaraan Patroli dan alat – alat pendukung lalu lintas lainnya.

Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Perizinan Angkutan di Kab. Balangan dan Kab. Tabalong

Kegiatan pengawasan over dimensi, over loading dan perizinan angkutan, pengaturan dan pemanduan serta penegakan hukum dengan harapan masyarakat sadar tertib berlalulintas, tertib kelengkapan surat-surat kendaraan, dan kendaraan laik jalan sesuai dengan hasil pemegujian berkala untuk kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan penumpang umum guna mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan mengutamakan keselamatan sebagai sarana penunjang pembangunan ekonomi masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan dilokasi Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor di Balangan dan di dilokasi Mabuun Kabupaten Tabalong



Kegiatan Pengawasan Over Dimensi, Over Loading dan Perizinan Angkutan di Kabupaten Kotabaru

Kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian ditingkat kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan dan dokumen kelengkapan kendaraan, dengan menentukan lokasi pemeriksaan yang menjadi perlintasan kendaraan yang akan diperiksa.

Kegiatan dilaksanakan di di Terminal Stagen Kotabaru



Foto Dokumen Kegiatan Pengamanan lalu Lintas Triwulan IV TA. 2023



Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas pada pelaksanaan Sholat Istisqa bersama Gubernur Kalimantan Selatan dan Para Alim Ulama di Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 07 September 2023

Melaksanakan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas pada kegiatan Gerak Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda 2023



5.2 Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan

Tabel 3.28 Sasaran Strategis Kepala Seksi

Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	Tersedianya Perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia	926 Unit	926 Unit	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	372 Unit	372 Unit	100%
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	13 Laporan	13 Laporan	100%
Rata Rata Capaian					100%

Sumber data : Pengukuran kinerja bulan desember tahun 2023

Tabel 3.29 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia	-	-	-	-	-	926 Unit	926 Unit	100%
2	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	-	-	-	-	-	372 Unit	372 Unit	100%
3	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	13 Laporan	13 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian									100%

Sumber data : LAKIP 2022

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- a. Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia 926 Unit
- b. Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara 372 Unit
- c. Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor 13 Laporan

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait

- a. Terpasangnya perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia 100%
- b. Terpeliharanya perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara 100%
- c. Terselenggaranya laporan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Kondisi yang mempengaruhi Peningkatan dan Penurunan Kinerja kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Jalan Provinsi, Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Provinsi dapat ditentukan oleh faktor teknis juga seperti kesiapan Pelaksanaan E-Purchasing, Proses E-Purchasing, Pelaksanaan di lapangan oleh penyedia, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung faktor keselamatan.

4) Analisis Program / Kegiatan Penunjang Kinerja

Kegiatan yang terencana dengan optimal, baik secara administrasi maupun teknis serta diwujudkan dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

Foto – Foto





5.3 Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Tabel 3.30 Sasaran Strategis Kepala Seksi Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas Jalan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
		Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	100 %
		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan	6 Laporan	100 %
		Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	11 Laporan	11 Laporan	100 %
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	6 Kali	6 Kali	100 %
Rata Rata Capaian					100%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember Tahun 2023

Tabel 3.31 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan

12	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Penataan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	-	100%	-	-	-	-	-	-

	provinsi								
2	Jumlah Ujicoba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi yang terlaksana	-	130%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah rekomendasi andalalin yang di terbitkan	-	160%	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah rekomendasi andalalin yang diawasi	-	100%	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
6	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%
7	Jumlah Laporan	-	-	-	-	-	11 Laporan	11 Laporan	100%

	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin								
8	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	-	-	-	-	-	6 Kali	6 Kali	100%
Rata-Rata Capaian									100%

Sumber data : -

1) Perbandingan Realisasi Dengan Target

- Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ provinsi realisasi = 2 Dok, Target = 2 Dok, sehingga progressnya = 100%
- Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. Realisasi = 12 Kab./Kota, Target = 12 Kab./Kota, Progressnya = 100%
- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Provinsi yang terlaksana. Realisasi = 6 Kali, Target = 6 Kali, Progress = 100%
- Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin. Realisasi = 11 Dokumen, Target = 11 Dokumen, Progress = 100%
- Jumlah laporan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang terawasi Realisasi = 6 kali, Target = 6 Kali, Progress = 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait

- Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi. Realisasi = 2 Dokumen, yakni Dokumen Review Rinduk LLAJ dan Dokumen Kebutuhan Faskes Jalan.
- Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi. Realisasi = 12 Kab./Kota, Yakni : Persiapan Haul Guru Sekumpul, Survey dan Menyusun dan mengolah data Penataan MRLL Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Sungai Ulin – Mataraman, Persiapan ANgkutan Lebaran, Kajian Simpang Sei Salak, Persiapan Lokasi Kemah Bela Negara Tk. Nasional, Manrek di Jl. Sudirman dan Kawasan Wisata Siring, Hari Jadi Pemprov Kalsel, Harhubnas, Simpang 4 Kong ex, Pomnas, Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru dan RAK Kalsel,
- Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi. Realisasi = 6 Kali, Yakni : Rapat Koordinasi dan Survey Bersama Kesiapan Jalur Angkutan Lebaran 2023 dengan Pihak BPJN, BPTD, Ditlantas, Dinas PUPR Provinsi serta Forum LLAJ Kab./ Kota Se-Kalsel, Manrek di Jl. Sudirman dan Kawasan Wisata Siring, Penataan Simpang Gt. Manggis. Kunjungan Korban Kecelakaan, Rakor 5 Pilar Keselamatan dan Persiapan Nataru dan Sosialisasi RAK Kalsel.
- Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Realisasi = 11 Dokumen, Yakni : Rekomendasi Pembangunan Underpas PT. Jorong Barutama Greston, Underpass PT. Tunas Inti Abadi, Standar Teknis Perumahan Ariqa Kab. Tala, Standar Teknis Kawasan Wisata Alaska Park, Kawasan Wisata Bukit Bintang, Kantor Sekber Lintas Agama Kota Banjarmasin, PT. Chieljedang, PT. AXEL Batu Ringan, Akses Jalan Bandara, Fasilitas Integrasi, dan Kawasan Industri Jorong.

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang terawasi Realisasi = 6, Kawasan Wisata Breeze Waterpark, Kantor PU Banjarbaru, SPBU Bundaran Masjid Banjarbaru, Rusun PUPR, Amanah Borneo Park, D'Legenda.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

- Review Kembali data yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kondisi terkini;
- Menyesuaikan dengan sasaran kerja pimpinan.
- Konsultasi perencanaan yang profesional

Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan provinsi

- Perlengkapan Peralatan Survey;
- SDM yang memenuhi dan dukungan program lanjut untuk tidak lanjut mitigasi

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Provinsi.

- Semakin meningkatnya permasalahan yang timbul di LLAJ;
- Dukungan program lanjutan untuk tindak lanjut Mitigasi.
- Koordinasi setiap anggota Forum LLAJ.

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil andalalin;

- Kondisi perekonomian yang sangat mempengaruhi dalam membangun, mengembangkan usahanya atau berinvestasi di kalsel;
- Kesadaran pemrakarsa akan pentingnya Dokumen Andalalin bagi kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas;
- Sosialisasi kepada pelaku instansi pemerintah yang terlibat akan pentingnya dokumen andalalin

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang terawasi

- Kepatuhan para pembangun terhadap rekomendasi Andalalin;
- Tim monitoring untuk instansi lain belum tercover anggaran dananya
- Sosialisasi kepada pelaku usaha.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

- Dukungan program lanjutan untuk tindak lanjut Mitigasi.
- Perlu studi lanjutan untuk didetaikan lagi perbidang atau seksi

Jumlah Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi

- Pengadaan perlengkapan dan peralatan Survey.

Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Provinsi.

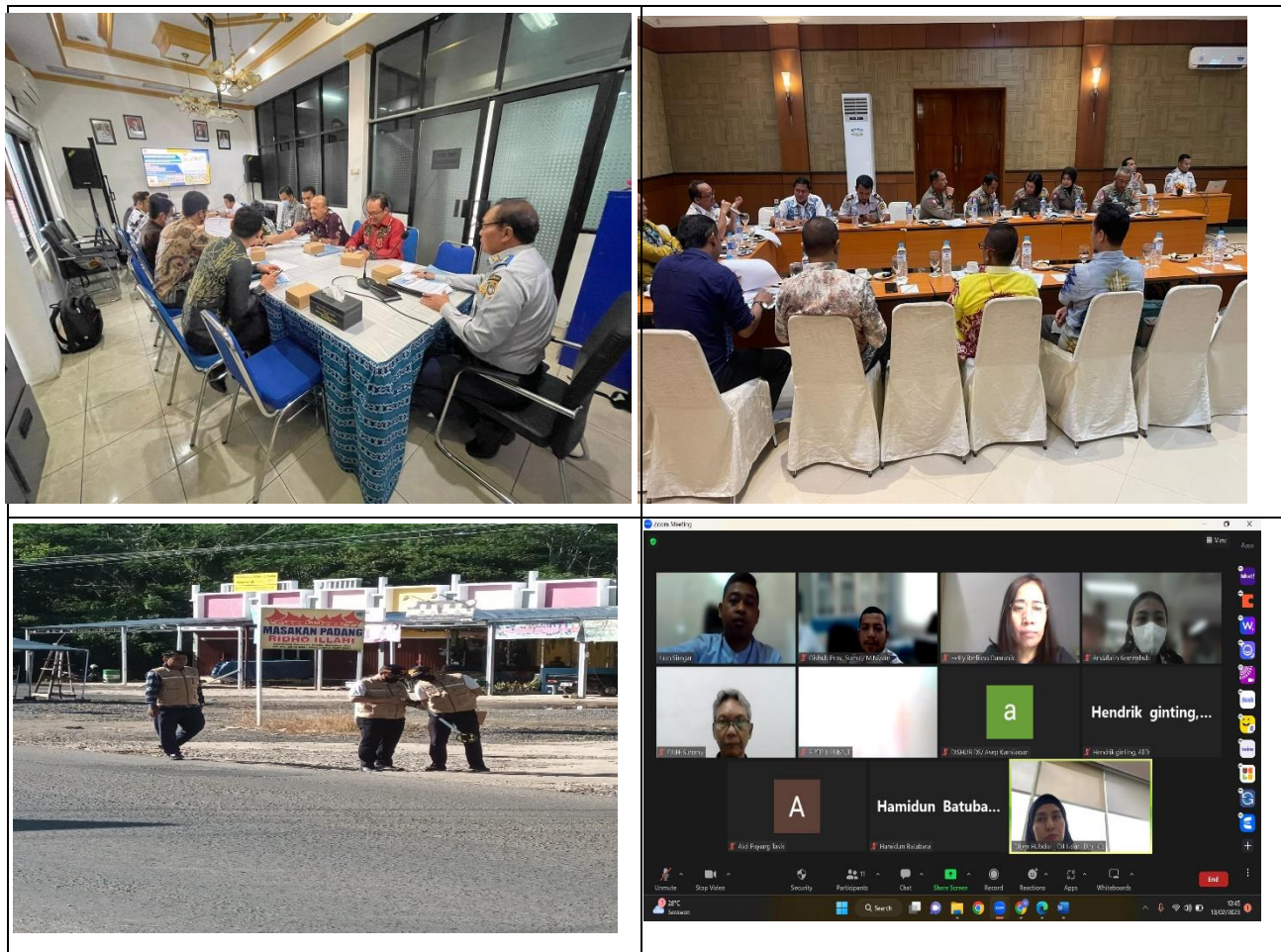
- Dukungan program lanjutan untuk tindak lanjut Mitigasi.
- Perlu Dukungan Kebijakan Pimpinan Daerah agar Hasil Forum ini bisa terlaksana.

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.

- Dukungan program lanjutan untuk tindak lanjut Mitigasi dan Diklat Penilai Andalalin
- Sosialisasi kepada para pembangun tentang perlunya andalalin serta ke instansi terkait

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang terawasi

- Dukungan program lanjutan untuk mengcover instansi dalam tim monitoring.



6. Kepala Bidang Angkutan Jalan

Tabel 3.32 Sasaran Strategis Kepala Bidang Angkutan Jalan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Prov. Kalsel	Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP	15%	15%	100%
		Persentase terangkutnya barang	100%	100%	100%
		Persentase ketepatan waktu tempuh trayek angkutan umum	80%	45%	54%
Rata Rata Capaian					84,66%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember Tahun 2023

Tabel 3.33 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Bidang Angkutan Jalan

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2022		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP	-	15%	-	-	-	15%	15%	100%
2	Persentase terangkutnya barang		100%				100%	100%	100%
3	Persentase ketepatan waktu tempuh trayek angkutan umum		100%				80%	45%	54%
Rata-Rata Capaian									84,66%

Sumber data : -

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Pencapaian indikator Persentase Terangkutnya penumpang pada angkutan umum penumpang AKDP terealisasi sebesar 15 % dari target 15 % sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- Pencapaian indikator Persentase terangkutnya barang terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- Pencapaian indikator Persentase ketepatan waktu tempuh trayek angkutan umum terealisasi sebesar 45% dari target 80% sehingga persentase capaian sebesar 54%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi secara keseluruhan untuk 3 indikator yang ditetapkan, 2 indikator sesuai target sedangkan 1 Indikator belum bisa memenuhi target hal ini dikarenakan target yang ditetapkan merupakan gabungan dari bidang Lainnya.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pencapaian kinerja pada tahun ini untuk sebagian besar indikator telah memenuhi target. Pencapaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Guna mencapai target kinerja Bidang Angkutan Jalan, terdapat beberapa kegiatan-kegiatan pada seksi-seksi di Bidang Angkutan Jalan. Kegiatan-kegiatan pendukung dan penunjang kinerja terangkutnya penumpang orang berada pada Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek & Terminal (AODTT) dan Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan (PMP).

Penyelenggaraan angkutan massal BRT Banjarbakula berada pada kewenangan kendali teknis oleh Seksi PMP, sedangkan pengawasan dan pembinaan layanan angkutan umum penumpang AKDP diampu oleh Seksi

AODTT. Pengawasan dan pembinaan yang diampu oleh Seksi AODTT termasuk pada cakupan pengawasan pemenuhan standar waktu tempuh pelayanan angkutan umum AKDP.

Sedangkan kinerja penyelenggaraan angkutan barang, diampu oleh Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang (AOTDT-AB) melalui kegiatan pengawasan angkutan barang. Dalam hal pengawasan angkutan barang, Seksi AOTDT-AB bersinergi dengan Seksi Operasional & Pengendalian dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dimensi dan batas maksimal muatan.

Segala bentuk program kegiatan yang direncanakan dengan seksama, terperinci dan terukur baik secara administrasi maupun teknis dapat diwujudkan dengan dukungan anggaran, kerjasama internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi informasi



6.1 Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Tabel 3.34. Sasaran Strategis Kepala Seksi Angkutan Orang

Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan ketertiban angkutan umum di Kalsel	Tersusunnya kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi.	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dan pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi.	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Tabel 3.35. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Seksi

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek yang diberikan rekomendasi (Pertimbangan teknis)	-	100%	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah dokumen rencana pengawasan layanan angkutan umum tidak dalam trayek	-	100%	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah dokumen kegiatan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	2	2	100%

	kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi.						Domuen	Dokumen	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi.	-	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian									100%

Sumber Data : -

1) Perbandingan Realisasi dengan Target :

Realisasi secara keseluruhan untuk 2 indikator/kinerja utama sudah sesuai dengan target rencana yaitu :

- Tersusunnya kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi dimana kegiatannya adalah melalui proses pengadaan jasa konsultansi dengan target akhir 2 dokumen, realisasi sampai akhir bulan Desember ini sudah teralisasi 2 dokumen;
- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dishub Kabupaten Tabalong dan Dishub Kabupaten Kotabaru serta Dinas PMPTSP Prov.Kalsel) dengan target 4 laporan, realisasinya sampai dengan bulan Desember 4 laporan (100%).

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait :

- Tersusunnya kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi dimana kegiatannya adalah melalui proses pengadaan jasa konsultansi dengan target akhir 2 dokumen, realisasi sampai bulan Desember 2023 sudah terealisasi 2 dokumen.
- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan provinsi dimana kegiatannya melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Dishub Kabupaten Tabalong dan Dishub Kabupaten Kotabaru serta Dinas PMPTSP Prov.Kalsel) dengan target 4 laporan, realisasinya sampai dengan bulan Desember 4 laporan (100%).

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja :

Berdasarkan realisasi kegiatan diatas dimana dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dapat berjalan sesuai target, sehingga kinerja Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang dapat dikatakan sesuai dan berjalan optimal.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 belum ditunjang oleh dukungan dana kegiatan pengawasan dilapangan oleh karena itu diharapkan dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek dan Angkutan Barang di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Foto-Foto Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi (Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek) yang wilayah operasinya Kewenangan Provinsi



6.2 Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Tabel 3.36 Sasaran Strategis Kepala Seksi Angkutan Orang
Dalam Trayek dan Terminal

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terlaksananya Pengawasan Angkutan umum	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi	4 Laporan	4 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2022/3

Tabel 3. 37 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2024	2023		
		2021	2022	2023	Target		Realisasi	% Capaian	
1.	Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi	-	0%	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2.	Jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan	-	100%	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	

	kebijakan trayek antarkota dalam provinsi								
3	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	
4	Jumlah data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	200%	-	-	-	-	-	
5	Jumlah pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	100%	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	
6	Jumlah rekomendasi pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang dilakukan monitoring dan evaluasi	-	100%	-	-	-	-	-	
		Rata-Rata Capaian							100%

Sumber Data : -

1) Perbandingan Realisasi dengan Target :

Realisasi secara keseluruhan untuk 4 (empat) indikator sampai dengan Triwulan IV(ke-empat) sesuai dengan target realisasi capaian yaitu sebesar 100 % yaitu :

- a. Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi
- b. Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi
- c. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi
- d. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait :

- a. Realisasi sampai dengan Triwulan IV (ke-empat) untuk Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi dengan capaian masih 100% dari target 1 (satu) dokumen yang ditetapkan, disebabkan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi masih dalam tahap proses pelaksanaan pekerjaan, dimana penanda tanganan Surat Perjanjian dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 antara Pejabat Penanda Tangan Kontrak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Direktur Cabang CV. Tika Kreatif Desain Konsultan sebagai Konsultan Pelaksana dengan waktu pelaksanaan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 2 Desember 2023.

Dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 1 Desember 2023 antara Pejabat Penanda Tangan Kontrak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Direktur Cabang CV. Tika Kreatif Desain Konsultan sebagai pelaksana pekerjaan yang terdiri dari :

- Dokumen Laporan Awal;
- Dokumen Laporan Antara;
- Dokumen Draft Laporan Akhir;
- Dokumen Laporan Akhir;
- Peta Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi (AKDP);
- Draft Peraturan Gubernur Tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; dan
- Softcopy Dokumen dalam media SSD 1TB.

- b. Realisasi sampai dengan Triwulan IV (ke-empat) Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi dengan capaian 100% dari target 2 (dua) dokumen yang ditetapkan, yaitu :
- Dokumen Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi Periode I;
 - Dokumen Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Dalam Provinsi Periode II.
- c. Realisasi sampai dengan Triwulan IV (ke-empat) Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi sebanyak 4 (empat) laporan dengan capaian 100% dari target 4 (empat) laporan yang ditetapkan, terdiri dari :
- Laporan Triwulan I;
 - Laporan Triwulan II;
 - Laporan Triwulan III; dan
 - Laporan Triwulan IV.
- d. Realisasi sampai dengan Triwulan IV (ke-empat) Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebanyak 4 (empat) laporan dengan capaian 100% dari target 4 (empat) laporan yang ditetapkan, terdiri dari :
- Laporan Triwulan I;
 - Laporan Triwulan II;
 - Laporan Triwulan III; dan
 - Laporan Triwulan IV.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja :

- Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan provinsi pada tahun anggaran 2023 ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk penyusunan dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Kewenangan Provinsi pada tahun anggaran 2023 yang berisi data dan informasi jaringan trayek eksisting dan pelaksanaan *focus group discussion* sebagai langkah awal untuk penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dokumen dari kegiatan tersebut merupakan salah satu target

capaian indikator kinerja utama yang didalam tahun berjalan ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen.

- Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja eksisting jaringan trayek angkutan antarkota dalam provinsi di Kalimantan Selatan merupakan salah satu target indikator kinerja utama yang didalam tahun berjalan ditargetkan sebanyak 2 (dua) dokumen;
- Rekomendasi ijin angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang diawasi adalah sebagai bahan pertimbangan teknis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan kepada instansi yang berwenang menerbitkan ijin trayek angkutan orang dalam trayek yang merupakan kewenangan provinsi, dimana laporan dari kegiatan tersebut merupakan salah satu target capaian dari indikator kinerja utama yang didalam tahun berjalan ditargetkan sebanyak 4 (empat) laporan;
- Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah provinsi merupakan salah satu target capaian dari indikator kinerja utama didalam tahun berjalan yang ditargetkan sebanyak 2 (dua) buah laporan pengendalian dan pengawasan keputusan kepala daerah tentang penetapan tarif kelas ekonomi angkutan antarkota dalam provinsi di Kalimantan Selatan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 ditunjang oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berupa :

SUB KEGIATAN		Anggaran
1.	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Rp. 350.000.000,-
2.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota	Rp. 22.902.100,-
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Rp. 127.134.500,-
4.	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 35.274.000,-
JUMLAH		Rp 535.310.600,-

Berdasarkan rincian dari sub kegiatan yang ada masih kurang maksimal dukungan dana yang tersedia untuk dapat mewujudkan ketersediaan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal baik dari segi administrasi maupun segi teknis untuk penyelenggaraan angkutan umum.

Untuk pencapaian hasil yang maksimal dalam usaha Meningkatnya Kualitas dan Ketertiban Angkutan Umum di Provinsi Kalimantan Selatan sangat perlu adanya dukungan dana, sumber daya manusia dan dukungan secara politis. Sehingga apa yang ditergetkan untuk tersedianya angkutan umum yang efektif dan efisien. Angkutan umum yang efektif dan efisien adalah terwujudnya keselamatan pengguna, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur lincer, cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, dan rendah polusi.



6.3 Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Tabel 3.38. Sasaran Strategis Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	Terselenggaranya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau angkutan barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	6.570 Rit	6.570 Rit	100%
2	Terkendalinya dan terawasinya ketersediaan angkutan umum untuk orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / Atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi yang diawasi	4 Laporan	1 Laporan	25%
3	Perumusan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi	Tersusunnya dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					75%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Tabel 3.39 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi					2022		
		2021	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi	-	-	-	-	-	6.570 Rit	6.570 Rit	100%
2	Jumlah ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang	-	-	-	-	-	4 Laporan	1 Laporan	25%

	dan/atau barang antar kotda dalam 1(satu) provinsi yang diawasi								
3	Jumlah dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang haringan kewenangan provinsi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.	Jumlah ketersediaan ritase layanan bus rapid transit (BRT) yang beroperasi	-	100%	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi yang diawasi	-	100%	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian									75%

Sumber data : -

1) Perbandingan Realisasi dengan Target :

Realisasi secara keseluruhan untuk 3 (tiga) indikator sampai dengan Triwulan IV (keempat) yaitu :

- e. Jumlah 11 Unit memiliki target pelayanan sebanyak 6.570 rit pertahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.380 rit (Koridor 1); 1.095 rit (Koridor Bandara); 1.095 rit (Koridor Trikora)

- realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 (Triwulan IV) sebesar 6.570 rit adalah jumlah gabungan dari 3 (tiga) koridor, yaitu sebesar 4.380 rit (Koridor 1); 1.095 rit (Koridor Bandara); 1.095 rit (Koridor Trikora)
- f. Kegiatan pengawasan dilaksanakan setiap bulan dengan target capaian sebanyak 420 unit terawasi dalam 1 tahun, realisasi bulan Januari sampai Desember 2023 (Triwulan IV) sebanyak 56 armada yang disupervisi
- g. Kegiatan perumusan kebijakan sampai Desember 2023 dilakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan sistem swakelola pengadaan jasa konsultan. Dan sudah selesai dikerjakan oleh Pihak Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Realisasi Terkait :

- e. Realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 % (6.570 rit) dari target 6.570 rit adalah jumlah gabungan dari 3 (tiga) koridor, yaitu :
 - 4.380 rit (Koridor 1) dengan capaian sebesar 4.380 rit);
 - 1.095 rit (Koridor Bandara); dengan capaian sebesar 1.095 rit)
 - 1.095 rit (Koridor Bandara); dengan capaian sebesar 1.095 rit).
- f. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Laporan ketersediaan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi yang diawasi dengan capaian 25 % dari target 4 (empat) dokumen yang ditetapkan.
- g. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi dengan capaian 100% dari target 1 (satu) dokumen yang ditetapkan, telah selesai dikerjakan oleh Pihak Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin selaku konsultan.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja :

- Terselenggaranya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau angkutan barang antar kota dalam 1 (satu) provinsi pada Tahun Anggaran 2023 ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan jumlah frekuensi layanan BRT yang mampu menjawab jumlah permintaan kebutuhan layanan dari masyarakat, dimana dari kegiatan tersebut merupakan salah satu target capaian indikator kinerja utama yang ditargetkan sebanyak 6.570 rit ;
- Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi yang diawasi, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap jumlah angkutan umum yang tersedia.

Dimana indikator kinerja utama yang didalam tahun berjalan ditargetkan sebanyak 4 (empat) laporan ;

- Tersusunnya dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya kewenangan provinsi, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyusunan dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api wilayah perkotaan Banjarbakula, dimana dokumen yang dihasilkan dari kegiatan tersebut merupakan salah satu target capaian dari indikator kinerja utama yang didalam tahun berjalan ditargetkan sebanyak 1 (satu) dokumen ;

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja :

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 ditunjang oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berupa :

SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 251.101.200,-
2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Provinsi	Rp. 38.309.300,-
3. Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Rp. 500.000.000,-
JUMLAH	Rp 789.410.500,-

Berdasarkan rincian dari sub kegiatan yang ada masih kurang maksimal dukungan dana yang tersedia untuk dapat mewujudkan ketersediaan angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal baik dari segi administrasi maupun segi teknis untuk penyelenggaraan angkutan umum.

Untuk pencapaian hasil yang maksimal dalam usaha Meningkatkan Kualitas dan Ketertiban Angkutan Umum di Provinsi Kalimantan Selatan sangat perlu adanya dukungan dana, sumber daya manusia dan dukungan secara politis. Sehingga apa yang ditargetkan untuk tersedianya angkutan umum yang efektif dan efisien. Angkutan umum yang efektif dan efisien adalah terwujudnya keselamatan pengguna, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur lancar, cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, dan rendah polusi.

7. Kepala UPTD Terminal Tipe B Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.40. Sasaran Strategis Kepala UPTD Terminal Tipe B

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG TRANSPORTASI DI TERMINAL TIPE B	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B	77,55%	77,55%	100%
2	PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TATA USAHA KANTOR UPTD TERMINAL TIPE B	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B	100%	96,22%	96,22%
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					99,05%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Rumus Perhitungan :

- Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B

$$\text{Hasil Survei } N(\text{tahun})/N-1$$

Tabel 3.41. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala UPTD Terminal Tipe B

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023		
		2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengguna Terminal Tipe B	40%	10%	81,65%	77,55%	77,55%	77,55%	100%
2	Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan UPTD Terminal Tipe B	-	-	-	100%	100%	96,22%	96,22%
3	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Administrasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%

	Kepegawaian UPTD Terminal Tipe B							
4	Persentase Pemenuhan Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan UPTD Terminal Tipe B	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian								99,05%

Sumber data : LAKIP 2022

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2023 indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan kepuasan pengguna terminal tipe B dengan target 77,55% terealisasi 77,55% dengan persentase capaian 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2022 indikator kinerja ada 2 (dua) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan bidang transportasi di Terminal Tipe B dan pelayanan jasa administrasi tata usaha kantor UPTD Terminal Tipe B yang mana tidak sama dengan tahun tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- a. Pencapaian Sasaran Persentase Terminal yang Terpenuhi sarana dan prasarana yang sesuai standar Pada Tahun 2023 progres Terminal yang Terpenuhi sarana dan prasarana yang sesuai standar mulai meningkat. Melalui kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasana, pada Tahun 2023 sudah dilaksanakan secara bertahap karena SKPD yang dikelola sendiri UPTD Terminal Terminal Tipe B mendapat Pagu yang belum maksimal untuk seluruh Terminal yang dibawah oleh UPTD itu sendiri.
- b. Peningkatan dan penurunan kinerja UPTD Terminal terlihat antara 2022 dengan 2023 sehingga analisis perbandingan peningkatan dan penurunan kinerja bisa dikatakan meningkat dalam segi memberikan fasilitas yang baik karena perencanaan belanja modal ,pemeliharaan dan kegiatan rehabilitasi, serta meningkat dari segi pelayanan yang bisa dikatakan dari kenyamanan, kebersihan dan keamanan di lingkungan 5 (lima) Terminal Tipe B di Kalimantan Selatan.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator Esselon III UPTD Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan tidak terlepas dari Program-Program yang dilaksanakan selama tahun 2022, yaitu :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B



7.1 Kepala Subbagian Tata Usaha Terminal Tipe B

Tabel 4.42. Sasaran Strategis Kepala Subbagian Tata Usaha Terminal Tipe B

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN Terminal Tipe B	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	84%
2	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terminal Tipe B	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Terminal Tipe B dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terminal Tipe B	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester Terminal Tipe B	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Terminal Tipe B dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Terminal Tipe B	4 Laporan	4 Laporan	100%
4	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	2 Paket	100%
5	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dsediakan	4 Paket	4 Paket	100%
6	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	2 Paket	21 Paket	100%

		disediakan			
7	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
8	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
9	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	124 Laporan	124 Laporan	100%
11	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
12	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
13	Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
14	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100%
15	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	38 Unit	38 Unit	100%
Rata-Rata Capaian					98,94%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Tabel 4.43. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Subbagian Tata Usaha Terminal Tipe B

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023		
		2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	-	100%	84%	84%
2	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Terminal Tipe B dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terminal Tipe B	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Terminal Tipe B dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran Terminal Tipe B	-	-	-	-	100%	100%	100%
4	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	100%	100%	100%

5	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
6	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
7	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
8	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
9	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
10	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	-	-	100%	100%	100%
11	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
12	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
13	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%
14	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	100%	100%	100%
15	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	-	-	-	-	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian								98,94%

Sumber data : LAKIP 2022

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 84% dari target 100% sehingga capaian sebesar 84%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah laporan keuangan akhir tahun Terminal Tipe B dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun Terminal Tipe B UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Terminal Tipe B dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran Terminal Tipe B UPTD Terminal

Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%

- Pencapaian indikator **Persentase** Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%.
- Pencapaian indikator **Persentase** Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%
- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%

- Pencapaian indikator **Persentase** Tercapainya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara UPTD Terminal Tipe B terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 memiliki perbedaan pada indikator kinerja sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan/penyesuaian pada indikator kinerja maupun sasaran strategis.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Terminal Tipe B di bawah lingkup UPTD Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan UPTD Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Provinsi;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan maupun Kepala UPTD Terminal Tipe B sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja UPTD Terminal Tipe B, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan Reviu Renstra Dinas Perhubungan dengan menggunakan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis outcome
2. Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon III sampai dengan level Pelaksana di Lingkup UPTD Terminal Tipe B
3. Meningkatkan pencatatan aset, meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bekal pelaksanaan komunikasi publik yang efektif, serta pelayanan informasi yang optimal, yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap UPTD Terminal Tipe B
4. Peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, guna membentuk SDM yang handal, dan mampu melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

5. Melaksanakan perekrutan tenaga honorer yang kompeten dan berkualitas, guna mengisi kebutuhan SDM dan memperkuat performa dan kinerja.

- Kegiatan Pengecekan Retribusi



7.2 Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 4.44. Sasaran Strategis Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Berkembangnya sarana dan prasarana terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	100%	100%	100%
3	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	26 Unit	26 Unit	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Sumber data : Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Tabel 4.45. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah I

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023		
		2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	-	-	-	-	100%	100%	100%

Sumber data : LAKIP 2022

1). Perbandingan Realisasi dengan Target

- Pencapaian Indikator Persentase Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan Terminal Tipe B Kalsel (wilayah I) dengan target 100% telah mencapai realisasi 100%
- Pencapaian Indikator Persentase Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/rehabilitasi Terminal Tipe B Kalsel (wilayah I) dengan target 100% telah mencapai realisasi 100%
- Pencapaian Indikator Persentase Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Terminal Tipe B Kalsel (wilayah I) dengan target 100% telah mencapai realisasi 100%

2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 memiliki perbedaan pada indikator kinerja sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan pada indikator kinerja maupun sasaran strategis.

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang Terlayani Angkutan Kota Dalam Provinsi. Di provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 5 Terminal Tipe B yaitu Banjarmasin, Amuntai, Tanjung, Batulicin ,dan Kotabaru.
2. Persentase Persentase Jumlah AKDP yang beroperasi sesuai standar
3. Persentase Sarana Terminal Yang Mendorong kinerja dan pelayanan mendukung pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu guna pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan perencanaan transportasi di Kalimantan Selatan.
4. Peningkatan Transportasi Angkutan kota dalam provinsi yang taat regulasi

5. (kebutuhan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru) yang berdampak menurun dengan ketersediaan bus BRT, Bus BTS , Bus BTB, Travel mobil pribadi , dan angkutan online lainnya

4). Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal sebagai penunjang kinerja Terminal Tipe B meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
2. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Kegiatan Angkutan Kota Dalam Provinsi, tersedianya laporan data kinerja dan evaluasi kegiatan angkutan Kota dalam provinsi
3. Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu lintas Terminal, terlaksananya pemungutan retribusi secara tertib dan AKDP tertib masuk Terminal
4. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Sarana Prasarana Keselamatan Pelayaran di Kalimantan Selatan, tersedianya data kinerja dan evaluasi sarana prasarana keselamatan perhubungan
5. Inventarisasi dan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Angkutan kota, Terlaksananya Inventarisasi Fasilitas Keselamatan Angkutan Kota di Kalimantan Selatan
6. Capaian kinerja Capaian target (Kepuasan Masyarakat) Fasilitas Terminal
7. Persentase Peningkatan Transportasi Angkutan kota dalam provinsi yang taat regulasi (kebutuhan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru)



7.3 Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 4.46. Sasaran Strategis Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
2	Tersusunnya rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B	Jumlah rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B	1 Dokumen	0 Dokumen	%
Rata-Rata Capaian					50%

Sumber data : Laporan Pengukuran Kinerja Bulan Desember 2023

Tabel 4.47. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kepala Seksi Terminal Tipe B Wilayah II

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2023		
		2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	Jumlah rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B	-	-	-	-	100%	0%	%
Rata-Rata Capaian								50%

Sumber data : LAKIP 2022

1). Perbandingan Realisasi dengan Target

- Pencapaian Indikator Persentase Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Terminal Tipe B Kalsel (wilayah II) dengan target 100% telah mencapai realisasi 100%
- Pencapaian Indikator Persentase Jumlah rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B pada Terminal Tipe B Kalsel (wilayah II) dengan target 100% telah mencapai realisasi 0%

2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 memiliki perbedaan pada indikator kinerja sehingga perbandingan tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan pada indikator kinerja maupun sasaran strategis.

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

1. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang Terlayani Angkutan Kota Dalam Provinsi
2. Di provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 5 Terminal Tipe B yaitu Banjarmasin, Amuntai, Tanjung, Batulicin, dan Kotabaru. Persentase Persentase Jumlah AKDP yang beroperasi sesuai standar
3. Persentase Sarana Terminal Yang Mendorong kinerja dan pelayanan mendukung pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu guna pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan perencanaan transportasi di Kalimantan Selatan.
4. Peningkatan Transportasi Angkutan kota dalam provinsi yang taat regulasi (kebutuhan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru) yang berdampak menurun dengan ketersediaan Travel mobil pribadi dan angkutan online lainnya

4). Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal sebagai penunjang kinerja Terminal Tipe B meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembangunan Terminal AKDP guna pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
2. Peningkatan Jumlah fasilitas Terminal yang berkaitan dengan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang.
3. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Kegiatan Angkutan Kota Dalam Provinsi, tersedianya laporan data kinerja dan evaluasi kegiatan angkutan Kota dalam provinsi
4. Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban Lalu lintas Terminal, terlaksanannya pemungutan retribusi secara tertib dan AKDP tertib masuk Terminal
5. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Sarana Prasarana Keselamatan Pelayaran di Kalimantan Selatan, tersedianya data kinerja dan evaluasi sarana prasarana keselamatan perhubungan
6. Inventarisasi dan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Angkutan kota, Terlaksananya Inventarisasi Fasilitas Keselamatan Angkutan Kota di Kalimantan Selatan
7. capaian kinerja Capaian target (Kepuasan Masyarakat) Fasilitas Terminal
8. Persentase Peningkatan Transportasi Angkutan kota dalam provinsi yang taat regulasi (kebutuhan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru)

Kegiatan Prioritas yang sudah dilaksanakan di UPTD Terminal Tipe B untuk meningkatkan Pelayanan Bidang Transportasi dengan indikator persentase ketersediaan angkutan kota di Kalimantan Selatan. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan prasarana Terminal Tipe B KM 6 (Banjarmasin) di Kalimantan Selatan

Tujuan pengembangan transportasi Angkutan Kota Dalam Provinsi di Kalimantan Selatan adalah untuk :

1. Menjadikan Angkutan Kota dalam Provinsi yang Handal dan diharapkan oleh Masyarakat
 2. Jaminan Angkutan Kota dalam Provinsi yang sesuai Standar Pelayanan Minimum
 3. Menjadikan Angkutan Kota dalam Provinsi yang terkoneksi ke seluruh Tujuan
 4. Terjangkau oleh masyarakat
 5. Mengurangi Pembororosan Bahan Bakar Minyak disebabkan oleh Penggunaan Angkutan Pribadi
 6. Meningkatkan Potensi Tarikan wisata di Provinsi Kalimantan Selatan.
 7. Mengurangi penumpang yang terlantar
 8. Menjadikan kawasan yang bersih,aman, nyaman dan berintegrasi bagi pengguna jasa angkutan barang dan jasa
 9. Terkoneksi nya moda transportasi yang berkelanjutan.
- Pelayanan pada Tamu Asing (Wisatawan) yang perlu transportasi ke wisata di Kalimantan Selatan



- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Terminal KM 6





- Perjadin Luar Daerah (Provinsi)



- Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder



B. Akuntabilitas Keuangan

B.1. Berikut Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Prov. Kalsel

1. Anggaran dan Realisasi APBD-P 2023

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 74.186.249.054,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 71.592.823.742,- atau 96,38%

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21.597.381.054	20.815.227.249	96,38
1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.550.000	78.308.431	94,86
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.292.431.156	11.005.903.738	97,46
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.615.381.300	3.578.939.954	98,99
4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.450.200.000	1.441.842.202	99,42
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.686.950.498	3.298.826.740	89,47
6) Perencanaan Penggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	502.633.700	473.203.611	94,14
7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	574.494.400	562.940.000	97,99
8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	392.740.000	375.262.573	95,55
b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	48.943.136.200	47.490.852.052	97,03
1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	430.252.700	378.791.175	88,04
2) Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi	44.261.006.200	43.080.226.945	97,33
3) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.918.872.400	2.872.026.746	98,40
4) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	66.965.200	42.716.200	63,79

5) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	34.833.800	31.077.900	89,22
6) Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	289.410.500	263.858.818	91,17
7) Penetapan Rencana Umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota	372.902.100	329.566.806	88,38
8) Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	315.273.000	263.089.906	83,45
9) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	127.134.500	117.143.796	92,14
10) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	91.211.800	80.350.760	88,09
11) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.274.000	32.003.000	90,73

c. Program Pengelolaan Pelayaran	3.145.731.800	2.795.296.441	88,86
1) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	29.794.800	26.637.700	89,40
2) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.914.200	26.254.500	87,77
3) Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	93.813.500	91.630.980	97,67
4) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.992.209.300	2.650.773.261	88,59
d. Program Pengelolaan Perkeretaapian	500.000.000	491.448.000	98,29
1) Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah	500.000.000	491.448.000	98,29

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
JUMLAH			

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Tabel 49. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya konektivitas transportasi darat dan perairan • Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan • Meningkatkan keselamatan transportasi 	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21.597.381.054	20.815.227.249	96,38
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	48.943.136.200	47.490.852.052	97,03
		Program Pengelolaan Pelayanan	3.145.731.800	2.795.296.441	88,86
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	500.000.000	491.448.000	98,29

1. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Tabel 50. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

No.	2022		2023	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Perencanaan,

		6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 8. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 3. Persetujuan Hasil ANDALALIN untuk Jalan Provinsi 4. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang AKDP 6. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota 	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 2. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 4. Persetujuan Hasil ANDALALIN untuk Jalan Provinsi 5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang AKDP 7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 8. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan

		<p>a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>taksi dalam kawasan operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>9. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>11. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi</p>
	Program Pengelolaan Pelayaran	<p>1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam daerah Provinsi, Pelabuhan antar</p>	Program Pengelolaan Pelayaran	<p>1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam daerah Provinsi, Pelabuhan antar daerah</p>

		<p>daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional</p> <p>2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</p> <p>3. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas</p> <p>4. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>		<p>Provinsi dan Pelabuhan Internasional</p> <p>2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</p> <p>3. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas</p> <p>4. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>
			Program Penegolaan Perkeretaapian	1. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah
	3 Program	16 Kegiatan	4 Program	24 Kegiatan
	Total Anggaran		Total Anggaran	
	BELANJA DAERAH	45.170.966.118	BELANJA DAERAH	69.451.212.742

NO.	2022		2023	
	Belanja langsung	Jumlah	Belanja langsung	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	10.991.928.868	Belanja Pegawai	11.008.212.373
2.	Belanja Barang dan Jasa	15.050.659.250	Belanja Barang dan Jasa	18.115.037.169
3.	Belanja Modal	16.028.378.000	Belanja Modal	40.327.963.200
	Total	45.170.966.118	Total	69.451.212.742

B.2. Berikut Akuntabilitas Keuangan UPTD Terminal Tipe B

1. Anggaran dan Realisasi APBD-P 2023

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 3.696.000.000,-

Jumlah Anggaran dengan APBD-P 2023 : Rp. 3.771.000.000,-

Realisasi Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 3.459.023.253,- atau 91,726%

Tabel 51. Anggaran dan Realisasi APBD s/d APBD-P 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% Keuangan	% Fisik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1.961.682.000	1.767.960.973	90,12	98,01
A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.005.000	73.605.000	80,88	98,42
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.615.000	70.215.000	82,98	100
2. Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.195.000	3.090.000	96,71	100
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	3.195.000	300.000	9,39	55
B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.000.000	53.580.000	94	100
1. Beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000	53.580.000	94	100
C. Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.346.100	463.500.954	91,72	98,2
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.729.300	51.567.800	97,8	100
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.027.800	50.027.800	100	100
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.200.000	68.320.000	97,32	100
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.000	24.999.000	100	100
5. Penyediaan Bahan Bacaan	4.800.000	4.752.000	99	100

dan Peraturan Perundang-undangan				
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.590.000	263.834.354	87,19	97
D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289.630.000	239.038.389	82,53	90,16
1. Pengadaan Mebel	4.500.000	3.950.000	87,78	100
2. Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.130.000	235.088.389	82,45	90,16
E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.540.900	795.486.730	91,59	100
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	162.000.000	127.347.330	78,61	100
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.540.900	668.139.400	94,56	100
F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.160.000	142.749.900	95,06	100
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.560.000	85.289.900	93,15	100
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.600.000	22.660.000	96,02	100
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	108.880.000	99,43	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.734.318.000	1.616.972.280	93,23	94,1
G. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1.734.318.000	1.616.972.280	93,23	94,1
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	102.400.000	0	0	0
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	1.052.928.000	1.043.038.280	99,06	100
3. Rehabilitas dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	578.990.000	573.934.000	99,13	100

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Tabel 52. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1.	Meningkatkan Pelayanan Bidang Transportasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.961.682.000	1.767.960.973	90,12%
2.	Meningkatkan Sistem Transportasi yang Aman, Nyaman dan Terjangkau	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.734.318.000	1.616.972.280	93,23%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Tabel 53. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

No.	2022		2023	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 1. Kelengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan 	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan

		dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
7	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Total			Total	
2 Program		7 Kegiatan	2 Program	
20 Sub Kegiatan			20 Sub Kegiatan	
Total Anggaran			Total Anggaran	
BELANJA DAERAH		4.284.679.510	BELANJA DAERAH	
			3.771.000.000	

No.	2022		2023	
	Belanja langsung	Jumlah	Belanja langsung	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	88.815.000	Belanja Pegawai	99.348.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.044.364.510	Belanja Barang dan Jasa	3.382.022.000
3.	Belanja Modal	151.500.000	Belanja Modal	289.630.000
	Total	4.284.679.510	Total	3.771.000.000

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan disajikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan gambaran tentang pelaksanaan kinerja, serta anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyelesaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan selatan terdiri dari 4 indikator terkait RPJMD, 4 indikator utama terkait eselon II dan bidang/eselon III, secara umum semuanya telah mampu disampaikan.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mendapat pagu anggaran APBD-P sebesar Rp. Rp. 74.186.249.054,-. Serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 71.592.823.742,- atau 96,38% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.593.425.312,- atau 3,62%. Secara fisik kegiatan terealisasi 100%.

UPTD Terminal Tipe B pada tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.771.000.000,- dengan serapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 3.459.023.253,- atau 91,726%. Secara fisik kegiatan terealisasi 100%.

Demikian LAKIP ini dibuat dengan harapan sedikit tergambar kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pembangunan di sektor Perhubungan yang mengutamakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian.

Semoga laporan LAKIP ini bermanfaat bagi upaya pengembangan di Bidang Transportasi dan menjadi pedoman dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada masa yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk tahun mendatang upaya pencapaian kinerja yang lebih baik akan terus dilakukan, untuk itu kami akan melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur, melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun peningkatan strata pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada sektor perhubungan khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yang nyaman, aman, tertib, bersih dan tepat waktu.
3. Meningkatkan fasilitas sarana/prasarana dalam pelayanan Publik untuk Bidang Perhubungan dan Terminal.
4. Meningkatkan keselamatan di jalan Provinsi dan sungai dengan pengadaan Fasilitas Keselamatan yang sesuai standar.
5. Koordinasi sinergitas, kerjasama dan dukungan instansi lain.

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, terkait dengan rencana kerja antara Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se – Kalimantan Selatan.
- b. Kementerian Perhubungan, berkaitan dengan sinkronisasi program kerja Perhubungan dengan Provinsi dan Kota untuk menentukan prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terkait pembinaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Bersih Bebas Melayani/WBBM).
- d. Biro Organisasi terkait pengembangan kelembagaan tata laksana dan akuntabilitas SKPD.
- e. Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), berkaitan dengan perencanaan kinerja perhubungan yang termasuk dalam bidang Infrastruktur Kewilayahan.
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), berkaitan dengan kerjasama dan pengembangan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
- g. Instansi vertical lainnya yang menjadi satuan kesatuan dalam mendorong dan mendukung terhadap kinerja perhubungan. Yang mana dalam perkembangan kedepannya memerlukan banyak Kerjasama lintas sektor.

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Kepala Dinas,



M. FITRI BERNADI, A.P., M.Si

Kepala Dinas Utama Muda

NIP. 19751102 1994121 0 001